



SOSIALISASI Anggota polisi lalu lintas Polres Mojokerto membagikan masker saat sosialisasi di pasar tradisional Sawahan, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (8/4). Polres Mojokerto memakai cara unik dengan mengenakan helm berbentuk virus korona untuk menyadarkan masyarakat terkait kewajiban menggunakan masker saat keluar rumah.

6 Juta Pekerja Dijamin Negara

ADINDA PRYANKA, AMRI AMRULLAH

JAKARTA — Pemerintah menargetkan dapat membantu 6 juta pekerja yang terdampak tekanan ekonomi karena pandemi virus korona (Covid-19) sampai akhir tahun. Sebanyak 5,6 juta di antaranya merupakan pekerja informal, sedangkan sisanya pekerja di sektor formal.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengatakan, bantuan kepada sektor formal akan diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Bantuan melalui skema ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19.

Askolani menambahkan, pemerintah menargetkan dapat membantu 400 ribu pekerja sektor formal sampai akhir tahun. "Dari BP Jamsostek pun sudah siap melaksanakan dalam waktu dekat," ujar Askolani dalam telekonferensi dengan jurnalis, Rabu (8/4).

Kemenkeu masih melakukan pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait mengenai jenis dan mekanisme pemberian bantuan tersebut. Akan tetapi, Askolani menyebut mekanismenya tidak akan berbeda dengan skema Kartu Prakerja yang memberikan insentif dan bantuan pelatihan kepada pekerja informal. Hanya saja, cakupan Kartu Prakerja ditargetkan lebih luas, yaitu sampai 5,6 juta orang sepanjang tahun yang pendapatannya berkurang atau hilang karena pandemi Covid-19.

Pada bulan lalu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah melakukan soft launching Kartu Prakerja. Askolani mengatakan, pada Kamis (9/4), Kartu Prakerja akan dirilis secara resmi.

Dalam pelaksanaannya pada tahun ini, Kartu Prakerja mengalami modifikasi. Dari semula ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pekerja informal, kini difokuskan kepada mereka yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19. "Kami sesuaikan dengan kondisi aktual saat ini," ucap Askolani.

Bersambung Ke hlm 7 Kol 1-6

Patroli Digencarkan

Warga yang menolak membubarkan diri dapat dikenakan sejumlah pasal.

FLORI SIDEBANG,
HAURA HAFIZHAH

JAKARTA — Aparat keamanan siap menggenjot patroli untuk memastikan warga menaati aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akan diberlakukan di DKI Jakarta mulai Jumat (10/4). Patroli pertama dilakukan untuk menertibkan kerumunan demi mencegah penyebaran Covid-19 makin meluas.

Ada sejumlah aturan mengenai kerumunan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertama, warga dilarang berkumpul lebih dari lima orang. Kemudian, Pemprov melarang acara yang melibatkan banyak orang, termasuk resepsi pernikahan, khitanan, dan sejenisnya.

Kapolda Metro Jaya Irfan Nana Sudjana menegaskan, polisi akan menindak warga yang menolak membubarkan diri saat ditembak sedang berkumpul selama pelaksanaan PSBB di Jakarta. Sebelum memberikan tindakan tegas, polisi akan terlebih dahulu mengimbau warga secara persuasif untuk membubarkan diri.

"Apabila masyarakat sudah diimbau tiga kali tetapi yang bersangkutan tetap menolak, jadi bisa dilakukan upaya penindakan hukum," kata Nana dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/4).

Nana menjelaskan, warga yang menolak membubarkan diri dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Warga yang menolak membubarkan diri juga terancam sanksi hukuman penjara selama satu tahun

dan denda maksimal Rp 100 juta. Hal itu tertuang dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

Ia menilai sanksi hukuman tersebut hanya bersifat tidak pidana ringan. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada warga.

Terkait pembatasan transportasi, Nana menyebut pembatasan penumpang berlaku bagi transportasi umum dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Jumlah penumpang harus dikurangi 50 persen dari total muatan seharusnya. "Kendaraan pribadi, misalnya mobil yang bisa membawa enam penumpang, hanya boleh diisi tiga orang," kata Nana, Rabu (8/4).

Bagi kendaraan roda dua, pengendara sepeda motor dan ojek daring dilarang membawa penumpang. "Tidak ada istilahnya berboncengan. Melanggar physical distancing."

Ketentuan mengenai larangan ojek daring membawa penumpang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Pedoman PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI sedang mendiskusikan dan menunggu keputusan pemerintah pusat terkait operasional ojek.

Anies mengaku juga sudah berkoordinasi dengan para operator penyedia transportasi daring. Menurut dia, para operator menyatakan telah memiliki mekanisme yang jelas terkait pencegahan penularan Covid-19. "Karena itu kita merasa ojek (tetap dapat beroperasi). Selama mereka mengikuti prosedur tetap, bisa mengangkut orang dan barang," kata Anies dalam konferensi pers, kemarin malam.

Dalam kesempatan itu Anies menegaskan, PSBB diberlakukan mulai Jumat dini hari. Untuk mengaktifkan pengawasan aturan soal kerumunan, Anies menyatakan, patroli bakal digencarkan seluruh jajaran melibatkan polisi dan TNI. "Akan banyak patroli karena kita harus memastikan tidak ada kerumunan," katanya.

Menjelang pelaksanaan PSBB, suasana Jakarta terpantau masih cukup ramai. Arus lalu lintas di Jalan

Panjang, Jakarta Barat, menuju arah Kedoya, misalnya, tampak ramai oleh kendaraan bermotor pada jam pulang kerja. Hal serupa terlihat di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat. Mobil dan motor tampak melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Sementara, di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, para pengendara sempat terjebak kemacetan.

Lalu lintas Jakarta yang mulai ramai menjadi perbincangan warganet belakangan ini. Dirilantis Polda Metro Jaya pada Selasa (7/4) pun sempat menyatakan ada kenaikan volume kendaraan sebesar 10 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Regulasi transportasi

Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan sedang menyiapkan regulasi terkait pendataan transportasi bagi daerah yang ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Juru Bicara Kemhub Adita Irawati mengatakan, ada beberapa hal yang bakal diatur dalam permenhub tersebut.

Adita menjelaskan, pengaturan jarak fisik harus diterapkan pada setiap kendaraan pribadi. Pengendara sepeda motor pun tidak boleh membawa penumpang. "Mobil pribadi juga harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya," ungkap Adita.

Selain itu mengatur PSBB, permenhub yang sedang disiapkan juga mencakup aturan-aturan mengenai aktivitas mudik. Menurut Adita, pemerintah pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk tidak mudik.

Bagi masyarakat yang berkesempatan tetap mudik, terutama yang berasal dari wilayah PSBB, harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari saat tiba di kampung halamannya. Begitu juga isolasi untuk 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lainnya. ■ *rikyan adiudha/rahayu subekti/antara ed: satria kartika yudha*

Aturan PSBB di DKI Jakarta

- Dilarang berkerumun lebih dari lima orang.
- Pengendara motor dilarang berboncengan.
- Transportasi umum beroperasi pukul 06-18.00 WIB.
- Jumlah penumpang setiap armada transportasi umum dikurangi 50 persen.
- Pengguna transportasi umum wajib mengenakan masker.
- Kendaraan pribadi harus membatasi jumlah penumpang.
- Delapan sektor/bidang tetap boleh beroperasi. Yaitu sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan (termasuk pasar modal), logistik, kebutuhan sehari-hari (warung, toko kelontong), dan industri strategis.
- Tidak ada penyekatan jalan.
- Dilarang menggelar resepsi pernikahan, khitanan, dan sejenisnya.
- Seluruh fasilitas umum seperti taman, museum, ditutup. Begitu juga dengan tempat hiburan.
- Aktivitas belajar dan mengajar tetap dilakukan di rumah.

Sumber: Pemprov DKI, Polda Metro Jaya

Korban Melonjak, Trump Salahkan WHO

FITRIYAN ZAMZAMI, KAMRAN DIKARMA

NEWYORK — Penularan Covid-19 di Amerika Serikat belum menunjukkan tanda mereda dengan catatan kematian yang terus memecahkan rekor tertinggi. Kendati demikian, angka penularan diharapkan bisa segera melandai dalam beberapa waktu mendatang.

Pada Selasa (7/4), seperti dicatat pendataan John Hopkins University, hampir 2.000 kematian tercatat dalam 24 jam terakhir, membuat total korban meninggal di AS mencapai 12.857 jiwa. Jumlah itu jauh melampaui kematian terbanyak dalam sehari sebelumnya, yakni 1.330 kematian. Jumlah kematian terbanyak dalam sehari tersebut tercatat di negara-negara bagian yang paling terdampak. Di antaranya New York (731 kematian), New Jersey (232 kematian), dan Connecticut (71 kematian).

"Di balik angka-angka itu adalah individu-individu, keluarga, seorang ibu, seorang ayah, saudara, saudara. Banyak keluarga hari ini untuk warga New York," kata Gubernur New York Andrew Cuomo dalam jumpa pers, seperti dilansir *The New York Times*, Selasa (7/4) waktu setempat.

Sedangkan, jumlah penularan kasus per hari sepanjang Selasa tersebut sebanyak 33.331. Jumlah itu adalah yang tertinggi kedua setelah jumlah penularan pada 3 April lalu sebanyak 34.196 kasus. Secara total, penularan di AS mencapai 400.549 kasus.

Angka itu jauh melampaui kasus penularan terbanyak selanjutnya sebanyak 146.690 kasus di

Bersambung Ke hlm 7 Kol 1-6

TIDAK TERBIT

Sehubungan dengan perayaan **WAFAT ISA AL MASHI**, *Republika* **TIDAK TERBIT** pada **Jumat, 10 April 2020**. *Republika* **TERBIT KEMBALI** pada **Sabtu, 11 April 2020**.

Ikuti berita terkini di www.republika.co.id.

REHAT
Harga gula di pasar masih tinggi
Katanya mau impor?
6 juta pekerja dijamin negara
Jangan dijadikan alasan untuk PHK

Subsidi Butuh Akurasi Data
Kemenkeu mengkaji skema penyaluran subsidi energi langsung kepada masyarakat. Dengan skema ini, subsidi tidak lagi disalurkan melalui perusahaan BUMN.
FINANSIAL HLM 10

PPDB 2020 Wajib Daring
Kemendikbud menegaskan, segala bentuk penerimaan siswa baru, baik dari sekolah negeri maupun swasta, wajib dilakukan secara daring.
NASIONAL HLM 3

Wuhan Cabut Lockdown
Setelah menjalani lockdown selama 11 pekan, warga Wuhan boleh melakukan aktivitas di luar rumah dan bepergian.
INTERNASIONAL HLM 4

REPUBLICA ONLINE
Available on Google Play and the App Store

REPUBLICA **BPJS Kesehatan**

REKENING BANK MANDIRI

NO	NAMA	JUMLAH
432	NN	200,000
433	NN	200,000
434	NN	1,500,000
435	NN	300,000
436	NN	300,000
437	NN	100,000
438	Ety Gitaningsih	100,000
439	NN	50,000
440	Arief P. Moe	1,000,000
441	NN	150,000
442	Prata Kadir	500,000
443	Eduwin H	20,000
444	Fintek Karya Nusantara	100,000

REKENING BANK BCA

NO	NAMA	JUMLAH
342	Catur Rakhman	100,000
343	Sukarniati	100,000
344	Titi Setiawan	25,000,000
345	Ganis Mashuda	500,000
346	Seta Jaladriyanta	500,000
347	Emmylia	500,008
348	Mk Khamid Rifai	500,000
349	Ibu Yesliva Arni	1,000,000
350	Wiwih Indartining	100,000
351	Heni Iriantono	2,550,000

TOTAL SUMBANGAN
19 Maret - 08 April 2020: **Rp 1,160,020,432**

1 Sumbangan disalurkan dalam bentuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) ke:
- RS Pelnl Jakarta - RS Polri Soekarno
- RS AL Mintoharjo - RS KD Duren Sawit

2 Proses pengadaan barang:
- Baju APD : 1.250 pc
- Masker KN 95 : 200 pc
- Masker Sensi : 10.000 pc
- Masker Evomed : 200 box
- Google : 200 pc
- Sarung tangan : 100 pc

TOTAL PENGELUARAN SEMENTARA: Rp 808,483,000

SISA DANA SUMBANGAN Rp 351,537,432

GERAKAN GOTONG ROYONG BANTU TENAGA KESEHATAN CEGAH CORONA
Salurkan donasi Anda ke PT Republika Media Mandiri
BCA: 375-305-177-1
MANDIRI: 127-00-9090909-2



PEMBUBARAN

Anggota TNI dan Polri membubarkan warga yang berkumpul di acara pernikahan warga di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (8/4) malam. Patroli malam yang dilaksanakan anggota Polri, TNI dan Satpol PP tersebut untuk menertibkan warga yang masih berkerumun sebagai upaya mencegah penyebaran virus korona (Covid-19).

KILAS

Idham: Gakkum Jalan Terus

JAKARTA — Kepala Polri Jenderal Idham Aziz mengatakan, penegakan hukum akan berjalan terus sesuai dengan surat telegram yang telah dikeluarkannya. Pernyataan itu menanggapi kritikan terhadap penerapan pidana tuduhan penghinaan terhadap presiden.

Idham melanjutkan, proses penegakan hukum memang tidak bisa memuaskan semua orang. Ia menerima semua kritikan tersebut, tapi penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan surat telegram terkait pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan virus korona. "Khususnya dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum yang diembankan fungsi reseer kriminal dan jajarannya," kata Idham, Rabu (8/4).

Pada Senin (6/4), anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, meminta polisi tetap mengedepankan langkah persuasif dan bijak. "Warga negara yang kritis mengkritik kebijakan negara dalam mengatasi pandemi ini harus dilindungi. Polri harus bersama rakyat," kata Nasir. Ia juga meminta polisi hati-hati. Sebab, selain mengandung multitafsir dan seperti "pasal karet", aturan penghinaan presiden itu sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Idham mengatakan, kalau ada yang tidak setuju dengan penerapan hukum tersebut, mereka bisa menempuh mekanisme praperadilan. Diketahui, praperadilan adalah proses gugatan atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap seseorang. "Pro dan kontra itu hal yang biasa. Kalau ada yang tidak setuju, ada mekanisme tersendiri yang bisa ditempuh, yaitu mekanisme praperadilan. Mereka punya hak untuk mengajukan praperadilan," kata dia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Asep Adisaputra mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan Polri selama penyebaran Covid-19 pada prinsipnya sebuah pilihan terakhir. Polri mengedepankan upaya preventif dan *preemptif* ia menjelaskan, jika upaya preventif dan *preemptif* tidak efektif, upaya penegakan hukum pun diambil dengan maksud memberikan kepastian hukum bagi pelanggaran.

"Substansinya, telegram Bapak Kapolri ini menjadi panduan bagi penyidik dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum serta menjadi catatan penting," kata dia. ■ antara ed: iham tirta

Glenn Fredly Tutup Usia

JAKARTA — Penyanyi kondang, Glenn Fredly Deviano Latuhamallo tutup usia dalam usia 44 tahun, pada Rabu (8/4) petang. Glenn menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Meninggal tadi jam 6-an (sore) di rumah sakit Setia Mitra Fatmawati," kata Tompi, sahabat dekat Glenn sekaligus sesama musisi tanah air pada Rabu petang.

Glenn disebut meninggal karena radang selaput otak. Pria kelahiran Jakarta 30 September 1975 meninggalkan seorang istri, Mutia Ayu dan seorang anak perempuan.

Mutia Ayu menuliskan pesan menyentuh menghadap kepergian sang suami. Penyanyi dangdut berusia 25 tahun itu mengatakan kelak anak perempuan mereka yang baru berusia 40 hari akan bangga mengenang sosok sang ayah.

"Ketika Gema sudah dewasa nanti dan mengerti, Gema pasti akan berkata 'Gema Bangsa menjadi anak Perempuan Ayah, Tuhan selalu jaga Kami, I love you,' tulis pelantun lagu 'Juragan Empang' tersebut di laman Instagram miliknya pada Rabu.

Glenn Fredly dan Mutia Ayu menikah pada 19 Agustus 2019. Keduanya dikaruniai seorang putri bernama Gema Altana Syamirani Latuhamallo pada 28 Februari 2020. ■ antara ed: iham tirta

Napi Bebas Lebih Target

Sebanyak 35.676 narapidana dan anak telah dibebaskan.

DIAN FATH RISALAH

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM melaporkan, sebanyak 35.676 narapidana (napi) dan anak telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi hingga Rabu (8/4). Jumlah itu melebihi target pengeluaran napi terkait pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 yang semula hanya 30 ribu orang.

Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemendikbud Rika Aprianti mengatakan, program pembebasan narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan, dan lapas khusus anak akan berlangsung hingga pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir. Artinya, angka napi yang akan bebas masih akan bertambah.

"(Ini berakhir) sampai berhentinya darurat Covid-19 sesuai dengan penetapan pemerintah, Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020," kata Rika dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Rika menjelaskan, jumlah 35.676 napi yang telah dibebaskan itu adalah angka per 8 April pukul 09.00 WIB. Sebanyak 33.861 orang di antaranya keluar penjara melalui program asimilasi, yaitu 33.078 napi dewasa dan 783 anak. Sementara, 1.815

orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, yaitu 1.776 napi dewasa dan 39 anak.

Pembebasan itu dilakukan bertahap di seluruh Indonesia sejak 1 April, setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 10.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Aturan itu mengatur tentang pengeluaran napi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ibnu Chulidun mengatakan, program asimilasi dan integrasi itu tidak akan diberikan kepada narapidana kasus korupsi. "Adapun jika ada narapidana tipikor yang keluar pada saat bersamaan dengan program ini, hal itu murni. Karena sudah sesuai dengan masa pidananya," kata dia, kemarin.

Rencana pembebasan napi korupsi sempat menjadi polemik. Meski tidak termasuk dalam napi yang dibebaskan dalam program tersebut, Menkumham Yasonna berkeinginan mengusulkan revisi peraturan pemerintah untuk kepastian tersebut. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan ada pembahasan mengenai asimilasi dan integrasi bagi para koruptor.

Selain mengeluarkan napi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Dirjenpas juga mempertimbangkan pemindahan dan pemil-

FAKTA ANGKA

30.000
Napi ditargetkan bebas

35.676
Napi dibebaskan per 8 April

Sumber: Dirjenpas Kemendikbud

lahan napi dari satu lapas ke lapas lainnya yang lebih sedikit. Pemerintahan tersebut guna mengurangi beban kelebihan kapasitas di lapas strategis. Selain itu, KPK menyoroti soal *over staying* napi di sejumlah lapas. "Koordinasi dan segala penetapan dengan Ditjenpas tetap kita lakukan walau terkendala dengan situasi wabah Covid-19 saat ini," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penelitian dan Pengembangan KPK, Niken Ariati.

Perlu pengawasan

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho, mempertanyakan prosedur operasional standar pengeluaran para napi tersebut. Menurut dia, perlu mekanisme yang tepat dalam pengawasan terhadap napi yang dibebaskan, apalagi angkanya sudah melebihi 30 ribu orang. "Saya tidak tahu SOP yang betul, yang mana, karena ini suatu kondisi yang kondisiona. Sehingga sekarang ini masing-masing kanwil (kantor wilayah) lembaga pemasyarakatan yang membebas napi punya tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan dan penilaian

dari asimilasi yang bersangkutan," kata Hibnu, Senin lalu.

Hibnu berharap para napi itu tidak sekadar dibebaskan. Kontrol yang ketat perlu dilakukan oleh lembaga yang membebaskannya. Selain itu, hakim pengawas dan pengamat juga punya tanggung jawab penuh dalam pembebasan napi tersebut.

"Mengapa hakim itu bisa memutus tuntutan tiga tahun, divonis lima tahun, karena hakim melihat orang ini ternyata *enggak* bisa kalau cuma dibina tiga tahun, harusnya lima tahun. Ini yang harus dipahami oleh semua penegak hukum yang ada," kata dia.

Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Riau, Erdianto Effendy, mengatakan, pemerintah harusnya mencontoh negara maju. Di sana, napi yang menjalani pidana bersyarat diberi gelang cip.

"Gelang cip ini dapat menjadi kontrol atau pengawasan bagi tahanan atau narapidana bersyarat," kata Erdianto.

Selain pemberian gelang cip itu, publik diberi tahu bahwa pembebasan bersyarat adalah alternatif pidana dan bukan bebas sepenuhnya. Sebab, dalam masa asimilasi dan bebas bersyarat, kebebasan mereka tetap dibatasi, khususnya di dalam rumah saja, seperti konsep pidana tutupan tetapi di dalam rumah sendiri. "Karena dalam keadaan saat menghadapi pandemi Covid-19, kini orang yang tidak menjalani pidana saja juga dibatasi kebebasannya untuk tidak bepergian ke mana-mana," kata dia. ■ antara ed: iham tirta

Eks Dirkeu AP II Divonis 2,5 Tahun

JAKARTA — Direktur keuangan PT Angkasa Pura II 2015-2019, Andra Agussalam, divonis 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta dalam kasus suap pengadaan dan pemasangan *semi baggage handling system* (BHS) di kantor cabang AP II. Ia dinilai terbukti menerima suap sebesar 71 ribu dolar AS (sekitar Rp 988,738 juta) dan 96.700 dolar Singapura (sekitar Rp 996,381 juta) dari mantan direktur utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti), Darman Mappangara.

"Terdakwa terbukti menerima suap 71 ribu dolar AS dan 96.700 dolar Singapura dari eks direktur utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti), Darman Mappangara," kata ketua majelis hakim, Fashal Hendri, membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (8/4).

Andra Agussalam dan pengacaranya mengikuti sidang melalui telekonferensi dari rumah tahanan KPK. Majelis hakim berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), yaitu Haerudin, Ikhsan F, dan Putra Iskandar berada di gedung KPK.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU, yaitu lima tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta. Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan JPU KPK membuka sejumlah

rekoning Agussalam yang berada di BNI, Bank Mandiri, dan BCA yang selama ini diblokir.

Fashal Hendri menjelaskan, pemberian uang dari Darman Mappangara agar Andra mengupayakan PT Inti menjadi pelaksana pengadaan dan pemasangan *semi baggage handling system* (BHS) di kantor cabang AP II. Sama dengan AP II, PT Inti juga adalah perusahaan BUMN, tapi bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Darman selaku direktur PT Inti mengenal Andra sejak sama-sama bekerja di PT LEN Industri.

Pada 23 Agustus 2018, Darman memberi tahu Andra melalui WhatsApp bahwa ada rencana kontrak PT Inti melalui PT Angkasa Pura Properti untuk semi BHS (mencakup *x-ray*) sekitar Rp 200 miliar. Kemudian, Andra menyampaikan akan "mengawal" pekerjaan tersebut di tingkat direksi PT AP II.

Pada 25 Juli 2019, Darman meminta orang kepercayaan, Andi Taswin Nur, menyiapkan uang Rp 2 miliar untuk diserahkan kepada Andra supaya proses kontrak pekerjaan antara PT Inti dengan PT APP dan pembayaran uang muka cepat terlaksana.

Pada 26 Juli 2019, atas perintah Darman, Andi menyerahkan 53 ribu dolar AS kepada Andra melalui sopirnya,

Endang. Pada 27 Juli 2019, Andi kembali menyerahkan 18 ribu dolar AS kepada Endang. "Uang itu sebelumnya ditukarkan Andi di tempat penukaran valas di PT Ratumas Valasindo dengan uang sejumlah Rp 253,62 juta," kata hakim.

Pada 30 Juli 2019, Darman menghubungi Andra dan menyampaikan akan menyerahkan sebesar Rp 1 miliar dan meminta tolong agar uang muka ke PT APP ditambah. Alasannya, PT Inti membutuhkan sekitar Rp 16 miliar atau 20 persen dari nilai kontrak PT AP II ke PT APP yang akan digunakan untuk pemesanan barang.

Pada 31 Juli 2019, Darman menyerahkan Andi memberikan Rp 1 miliar kepada Andra ke dalam mata uang dolar Singapura. Andi lalu bertemu Endang di lobi Center Mall Casablanca dan menyerahkan 96.700 dolar Singapura. Tidak lama setelah itu, keduanya ditangkap petugas KPK.

Sebagai penguap Andra, Darman telah mendapat hukuman lebih dulu. Majelis hakim memvonis Darman dengan dua tahun penjara. Sementara Andi sebagai perantara suap divonis satu tahun empat bulan penjara.

Menanggapi putusannya, Andra menyatakan masih pikir-pikir. Begitu juga JPU KPK menyatakan menggunakan waktu 14 hari untuk pikir-pikir. ■ antara ed: iham tirta



PEMBAGIAN MASKER Polisi membagikan masker kepada pengendara sepeda motor dalam giat operasi keselamatan agung 2020 di Denpasar, Bali, Rabu (8/4). Kegiatan yang digelar Polresta Denpasar tersebut untuk memberikan pemahaman pentingnya mengikuti imbauan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 atau virus korona.

KPK Minta Kepala Daerah tak Ragu

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pengarahannya kepada seluruh kepala daerah terkait pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa percepatan penanganan virus korona atau Covid-19. Ketua KPK Firlil Bahuri menyampaikan, pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab pengembalian anggaran. KPK meminta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana tersebut.

"Laksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan

dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Firlil dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia melalui telekonferensi di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/4).

Dalam rapat itu, hadir Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto.

Firlil mengatakan, KPK ingin menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran di daerah menyusul Surat Edaran KPK Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pencegahan Korupsi dalam Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19. Salah satu poinnya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan.

"Dalam kondisi darurat pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara swakelola, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola," kata Firlil.

KPK, kata dia, juga meny-

dari di tengah situasi darurat, harga barang dan jasa terkait penanganan Covid-19 mengalami kenaikan signifikan karena permintaan global yang meningkat dan produsen terbatas. Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar tidak normal, tetapi KPK tetap berharap penggunaan anggaran mengedepankan harga terbaik atau *value for money*.

"Pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat cukup mengedepankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan cara men-dokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rang-

ka mencari harga terbaik atau *value for money* tersebut," ujar Firlil.

Firlil menjelaskan, dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan tidak selalu dengan harga terendah. Artinya, pelaksanaan pembelajaran anggaran harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan. "Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, proses pengadaan barang/jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," kata Firlil.

KPK sendiri akan melakukan pengawasan. Di antaranya dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah. Tim tersebut juga akan memonitor dan mengevaluasi alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar bebas dari korupsi.

"Saat ini, tim sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan," kata dia.

■ antara ed: iham tirta

MEMBAGIKAN MASKER

Petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membagikan masker gratis kepada calon penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (8/4). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk peduli bagi penumpang KRL untuk tetap mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan menggunakan masker di tempat umum.



Ekspor APD Disorot

Doni Monardo memastikan dokumen ekspor APD ke Korea Selatan sudah sesuai dengan aturan.

■ RONGGO ASTUNGKORO, SAPTO ANDIKA CANDRA

JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut maraknya ekspor masker dan alat pelindung diri (APD) di tengah kebutuhan domestik yang begitu tinggi sebagai suatu maladministrasi. Pemerintah semestinya mempertimbangkan untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

"Melakukan pembiasaan terhadap kondisi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu maladministrasi," ujar Anggota ORI, Alamsyah Saragih, dalam keterangan yang diterima *Republika*, Rabu (8/4).

Menurut Alamsyah, ORI telah menyampaikan ke publik pada 8 Maret lalu di mana prinsipnya pemerintah patut menertibkan kebijakan larangan ekspor. Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat Covid-19.

"Jika pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi, pemerintah

dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan *domestic market obligation* bagi industri yang memproduksi," ujar dia.

Untuk itu, kata Alamsyah, Kementerian Kesehatan atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, masker, anti-septik, dan APD ke dalam larangan dan/atau pembatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Dengan begitu, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan dokumen ekspor APD ke Korea Selatan, sudah sesuai dengan aturan ekspor yang berlaku. Pernyataan ini mengklarifikasi tuduhan adanya ekspor APD ke Negeri Ginseng itu menggunakan dokumen yang dipalsukan.

"Berkenaan dengan tuduhan pemalsuan kode HS, saya sampaikan bahwa dapat dipastikan bahwa ekspor yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan termasuk peng-

gunaan HS yang sesuai dengan fisik barang yang diekspor," kata Doni.

Menurut dia, saat ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan tengah merancang Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendag dan Menkeu tentang pengaturan kerja sama pembuatan APD dengan Korea Selatan agar pelaksanaannya lebih akuntabel dan transparan.

Doni mengatakan, Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati perjanjian kerja sama terkait ekspor APD. Dalam perjanjian tersebut, Korea Selatan berkomitmen memasok bahan baku APD ke Indonesia dan beberapa perusahaan Indonesia bertugas menajahi bahan tersebut sehingga menjadi APD.

Setelah produk APD tersebut jadi, maka setengah dari jumlah seluruh APD yang dihasilkan akan diekspor ke Korea Selatan dan sisanya untuk kebutuhan di dalam negeri. "Produk APD yang dibuat di Indonesia selanjutnya akan dibagi 50:50 untuk Indonesia dan Korsel," katanya.

Doni menjelaskan bahwa berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai hingga 6 April 2020, sudah 415.900 set APD yang diekspor ke Korea

Selatan dan sebanyak 626.000 set APD digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri.

Dari kesepakatan kedua belah pihak, Indonesia pun berkomitmen untuk mengekspor total 1.145.000 set APD ke Korea Selatan. Kerja sama ini, menurut Doni, menguntungkan bagi Indonesia karena industri dalam negeri menjadi lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku APD.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah telah mendatangkan lebih dari 679 ribu alat pelindung diri (APD). Dari angka tersebut, sebanyak 200 ribu didistribusikan pada Rabu (8/4), terutama ke sejumlah provinsi di Sumatra.

"Segera didistribusikan dan hari ini sudah ada pengiriman ke beberapa provinsi di Sumatra. Kami harap ini akan membantu petugas kesehatan supaya lebih profesional dan aman dalam berikan layanan," kata Yurianto, Rabu (8/4).

Selain APD, pemerintah menampung pendaftaran sebanyak 18 ribu relawan medis dan nonmedis yang bersedia terjun untuk menangani Covid-19 ini.

■ antara ed: mas alami huda

PPDB 2020 Wajib Daring

■ INAS WIDYANURATIKAH

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, segala bentuk penerimaan siswa baru, baik dari sekolah maupun swasta, wajib dilakukan secara online atau daring. Hal ini berkaitan dengan situasi darurat Covid-19 di Indonesia.

Selama masa darurat Covid-19, pemerintah melarang aktivitas yang menyebabkan orang berkerumun. Situasi ini memengaruhi aktivitas belajar mengajar, termasuk juga persiapan proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah.

"Penyelenggaraan penerimaan murid baru harus dilakukan secara daring (dalam jaringan) selama kondisi Covid-19 yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan," kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana, saat dihubungi *Republika*, Rabu (8/4).

Terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri diatur dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Pemerintah daerah atau dinas setempat perlu menyelenggarakan PPDB ini sebagaimana dilaksanakan oleh beberapa pemda sebelumnya. Selama masa darurat Covid-19, kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan harus ditiadakan.

"Ini sebagai bentuk respons terhadap masa darurat kesehatan, guna menyelamatkan dan menjaga siswa, orang tua, guru dari terpaparnya Covid-19 jika tidak dilakukan online," kata Ade.

Di dalam SE tersebut dituliskan bahwa pemerintah daerah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah daerah harus mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah.

Selain itu, terkait PPDB sekolah negeri, Pusat Data dan Informasi Kemendikbud akan memberikan bantuan teknis. Bagi daerah yang membutuhkan bantuan mekanisme PPDB daring, bisa mengajukan bantuan kepada Kemendikbud.

"Tidak per sekolah. Nanti daerah yang mengordinasikan penerapan PPDB online ke sekolah-sekolah mana yang dilibatkan," kata Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, Gogot Suharwoto.

Terkait sekolah swasta, sebagian sudah mengadakan penerimaan peserta didik sejak akhir 2019 lalu. Bahkan, ada yang telah menuntun pendaftaran Februari 2020. "PPDB kami tanggal 13 Januari sampai 14 Februari lalu. Jadi, sudah selesai sebelum Covid-19 meluas," ujar Kepala Sekolah SDIT Almuhtar Pontianak, Zaenuri.

Direktur Pendidikan SD Karakter Genius Islamic School, Eva Nawayah, mengatakan, pendaftaran siswa baru bisa dilakukan melalui surel (surat elektronik) atau aplikasi WhatsApp. "Untuk observasi menyusul," kata Eva.

Menag Kaji Dana Haji untuk Covid-19

■ ARIF SATRIO NUGROHO

JAKARTA — Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan, Kementerian Agama akan mengkaji usulan soal pengalihan dana haji untuk penanganan Covid-19. Usulan itu disampaikan bila haji tahun ini diputuskan ditunda oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Tentang kemungkinan haji ditunda, mungkin dananya bisa dialihkan untuk Covid-19. Mungkin akan kita kaji lagi lebih lanjut nanti," kata Fachrul dalam rapat daring bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu (8/4).

Usulan itu muncul dari anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nanang Samodra. Menurut Nanang, usulan ini hanya berlaku bila penyelenggaraan haji tahun ini tertunda.

"Saya ingin mengajak Pak Menteri mengasumsikan bahwa, atau membuat semacam skenario apabila ini ditunda, kira-kira dana untuk keperluan haji ini bisa dialihkan untuk menangan Covid-19," kata Nanang. Meski dirasa memungkinkan, Menag Fachrul masih berharap dana haji tak perlu dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tersebut. Dia berharap dana yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan dapat mencukupi kebutuhan penanganan Covid-19.

Sejauh ini, Kemenag masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi soal pelaksanaan ibadah haji tahun 1441 Hijriyah atau tahun 2020 terkait terjadinya pandemi Covid-19. Namun, Kemenag menyatakan tetap melakukan persiapan dan skenario terkait putusan haji.

"Sepanjang belum ada pemberitahuan secara resmi kepada Pemerintah RI tentang pembatalan haji, Kemenag tetap melakukan persiapan sesuai jadwal seperti biasa dengan beberapa penyesuaian," kata Fachrul Razi.

Fachrul menjelaskan, ada beberapa kegiatan persiapan ibadah haji yang mengalami penyesuaian

akibat terjadinya pandemi Covid-19. Pertama, pelaksanaan PPIH dilakukan dengan mekanisme tanpa tatap muka. Kedua, pelaksanaan pelatihan petugas haji ditunda di enam embarkasi.

Ketiga, manasik haji dilakukan secara daring dengan menyampaikan buku manasik lebih awal. Keempat, penundaan pelaksanaan pembayaran kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa pelayanan haji di dalam negeri atau di Arab Saudi.

Sementara, terkait dengan dilanjutkannya atau dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Kemenag telah menyiapkan sejumlah skenario sebagai upaya mitigasi. Skenario pertama adalah bila haji diselenggarakan dengan kuota normal. Menurut Fachrul, hal itu dilakukan bila situasi kondusif dengan dan semua bentuk pelayanan di Arab Saudi sudah berjalan normal. Skenario ini disiapkan dalam tiap tahap pelaksanaan haji mulai dari berangkat hingga pulang ke Tanah Air.

Skenario kedua adalah bila pembatasan kuota dilakukan. Skenario ini mengasumsikan haji tetap diselenggarakan, tetapi dengan pembatasan kuota akibat situasi di Arab Saudi yang masih berisiko atau jamaah berisiko bila tetap berangkat. Kuota diperkirakan dikurangi hingga 50 persen dengan pertimbangan ketersediaan ruang yang cukup untuk *physical distancing*.

Skenario berikutnya adalah ibadah haji ditunda. Ini dilakukan bila Pemerintah Arab Saudi menyatakan tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji juga bisa ditunda bila Kemenag tidak memiliki cukup waktu mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji akibat cepatnya perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, Pemerintah RI memilih tidak mengirim jamaah haji karena alasan keselamatan atau keamanan.

■ ed: mas alami huda



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
a private entrepreneurial model university by UNESCO

80

INTERNATIONAL AWARDS

210

AND MORE THAN NATIONAL AWARDS

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

- S1 TEKNIK INFORMATIKA/INFORMATIKA (Networking & Software Engineering)
- S1 SISTEM INFORMASI (Financial Technology, E-Commerce & Multimedia)
- S1 TEKNOLOGI INFORMASI (Animation & Game)
- S1 TEKNIK KOMPUTER (Cybersecurity & IoT)
- S1 TEKNIK INFORMATIKA (WebDev, Network, 2D Animation)
- D3 MANAJEMEN INFORMATIKA (Mobile Programming, Web Programming and Interactive Multimedia)

FAKULTAS EKONOMI & SOSIAL

- S1 EKONOMI (Digital Economy, Creative Economy & Banking)
- S1 KEWIRAUSAHAAN (Digipreneurship & On-line Business)
- S1 AKUNTANSI (Business & Taxation)
- S1 ILMU KOMUNIKASI (Visual Design, Marketing, Broadcasting & Cinema)
- S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL (International Business & Diplomacy)
- S1 ILMU PEMERINTAHAN (E-Government & Sociopreneurship)

FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

- S1 ARSITEKTUR (Digital Architecture & Product Design)
- S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (Smart City & Creative City)
- S1 INFORMATIKA GEOGRAFI/GEOGRAFI (GIS & Documentary Film)

PASCASARJANA

- S2 TEKNIK INFORMATIKA (Informatics Technopreneurship, Business Intelligence & Animation)
- PJJ S2 TEKNIK INFORMATIKA

INTERNATIONAL PROGRAM

MASTER OF INFORMATICS (Animation)
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY (Animation & Game)
BACHELOR OF INFORMATICS (Networking & Software Engineering)
BACHELOR OF INFORMATION SYSTEMS (Financial Technology, E-Commerce & Multimedia)
BACHELOR OF COMMUNICATION SCIENCE (Visual Design, Marketing, Broadcasting & Cinema)



Ayo Daftar Amikom

GELOMBANG I s.d 30 April 2020

GELOMBANG II s.d 26 Juni 2020

GELOMBANG III s.d 21 Agt. 2020

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 884201 ext. 101

0852-53444-999

Creative Economy Park
www.amikom.ac.id

Wuhan Cabut Lockdown

NG HAN GUAN/AP



PULANG Seorang petugas medis dari provinsi lain akhirnya akan pulang meninggalkan Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada Rabu (8/4), ia akhirnya bisa pulang setelah lockdown di Wuhan resmi dicabut.

Warga didesak tetap waspada dan memakai masker.

■ YEYEN ROSTIYANI

WUHAN — Kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina, mencabut lockdown atau karantina wilayah, Rabu (8/4). Setelah menjalani lockdown selama 11 pekan, warga Wuhan boleh melakukan aktivitas di luar rumah dan bepergian.

"Kita amat sadar bahwa kita tidak boleh berleha-leha karena kita belum bisa menyatakan kemenangan sepenuhnya," kata Wakil Gubernur Hubei Cao Guangjin di hadapan wartawan, Rabu. "Kita harus tetap tenang dan pada akhirnya harus tetap waspada seperti saat awal dulu."

Jalanan di Wuhan yang berpenduduk 11 juta jiwa ini kembali dipenuhi warga setelah selama 76 hari mereka terkurung di rumah masing-masing. Mereka mulai bepergian dengan bus, kereta, dan pesawat. Pada Rabu saja diperkirakan ada 65 ribu orang yang bepergian dengan kereta dan pesawat.

Warga amat sadar masih terlihat memakai masker meski lockdown dicabut. Rupanya Pemerintah Wuhan mendesak agar warganya masih tetap memakai masker.

Seorang pejabat di Bandara Wu-

han, Lou Guowei, mengatakan, pesawat pertama, yaitu MU2527 terbang meninggalkan Bandara Wuhan Tianhe International Airport pukul 07.25 waktu setempat. Pesawat terbang menuju Sanya, kota pantai di Provinsi Hainan yang terkenal dengan pantai-pantainya.

"Awak pesawat akan memakai pelindung mata, masker, dan sarung tangan sepanjang penerbangan," kata pemimpin pramugari dalam penerbangan ini, Guo Binxue, yang dikutip *Xinhua News*. "Semuanya akan berjalan lancar karena kami telah melakukan banyak persiapan untuk penerbangan ini."

Sejumlah calon penumpang tampak memakai pelindung lengkap, seperti jas hujan panjang atau penutup wajah. Seorang calon penumpang, Wang Wenshu, mengatakan akan terbang dan menemui orang tuanya.

"Tentu saja saya rindu mereka. Tolong jangan tanya-tanya lagi, bisakah saya akan menunggangi."
Pencegahan masih belum sepenuhnya dilepas. Sekolah masih belum dibuka, suhu tubuh juga masih diperiksa saat orang-orang memasuki gedung. Sedangkan, warga Wuhan yang tiba di Beijing harus men-

jalani dua putaran tes untuk memastikan mereka bebas dari virus korona.

Seorang warga Wuhan, Tong Zhengkun, adalah salah satu dari jutaan orang yang menikmati kebebasannya pada Rabu. "Saya tidak pernah berada di luar rumah selama lebih dari 70 hari," katanya terharu. Ia melayangkan pandang ke jembatan di atas Sungai Yangtze yang melintasi Wuhan.

"Berada di dalam rumah begitu lama membuat saya seperti gila," kata Tong.

Pusat perbelanjaan dan jajaran toko terbesar di Wuhan, seperti Chu River dan Jalan Han sebenarnya sudah buka sejak 30 Maret lalu. Namun, saat itu warga Wuhan masih belum diizinkan keluar Provinsi Hubei.

Antrean panjang mengular di pasar swalayan, sementara pembatasan jarak satu meter masih berlaku. Sejumlah warga lain menikmati udara hangat dengan melakukan aktivitas di luar ruang, seperti badminton atau berjoget bersama.

Tetap waspada

Wuhan menjadi pusat penyebaran virus korona. Hingga kini sumber dari virus korona tersebut masih dalam investigasi. Tak dimungkiri, sejumlah pasien pertama penderita Covid-19 terkait dengan pasar makanan terbuka di Wuhan.

Lockdown di Wuhan mulai diberlakukan pada 23 Januari. Pemberlakuan lockdown yang drastis dan ketat di Wuhan diyakini menjadi percontohan bagi negara-negara yang berupaya menghentikan laju penyebaran virus korona. Dalam waktu 21 hari terakhir, hanya ada tiga kasus baru infeksi virus korona.

Para pemimpin daerah Wuhan berjanji akan memulihkan kehidupan di Wuhan sambil mencegah datangnya infeksi gelombang kedua. Kini warga memiliki tantangan baru, yaitu memulai hidup seperti biasa sambil menjaga agar wabah yang menyuntik hidup mereka lagi.

Wuhan adalah pusat industri berat, khususnya otomotif. Sejumlah pabrik besar kini mulai beroperasi lagi. Namun, dunia usaha kecil dan menengah yang paling banyak terpengaruh tenaga manusia masih terpaksa karena kekurangan tenaga kerja dan pasar. Pemerintah berjanji akan menyuntikkan dana, termasuk pinjaman senilai 2,8 miliar dolar AS.

Hingga berita ini dituliskan, data John Hopkins University & Medicine menunjukkan Cina memiliki lebih dari 82.700 ribu kasus infeksi. Dari jumlah itu, lebih dari 50 ribu kasus ada di Wuhan dan lebih dari 2.500 orang meninggal dunia. Angka kematian di Wuhan ini mencapai 80 persen dari total kematian di seluruh Cina akibat Covid-19 yang total mencapai 3.333 orang. ■ Reuters/ap

KILAS

BMW Ikut Produksi Masker

MUNICH — Raksasa produsen mobil asal Jerman, BMW, mulai memproduksi masker untuk melindungi pegawai mereka dan masyarakat dari virus korona. Chief Executive Officer BMW Oliver Zipse mengatakan, langkah ini sebagai upaya menahan penyebaran virus penyebab penyakit Covid-19.

Pada Rabu (8/4) Zipse mengatakan, BMW segera bisa memproduksi ratusan ribu masker per hari. Perusahaan itu sudah mengirim 100 ribu masker ke pemerintah. Masker tersebut berasal dari pasokan yang mereka miliki.

BMW juga sudah memberikan 50 ribu masker lagi dan jutaan sarung tangan medis ke Pemerintah Jerman. Dalam dua pekan ke depan mereka akan kembali memberikan satu juta masker.

Pada Senin (6/4), BMW mengatakan, mereka akan memperpanjang masa penghentian operasi pabrik selama dua pekan hingga 30 April. Jerman merupakan negara kelima dengan jumlah kasus terbanyak di seluruh dunia. Jumlah kasus infeksi Jerman sudah melampaui titik awal pandemi, yaitu Cina. ■ Reuters/lintar satria ed: yeyen rostiyan

Dokter Bantu Pasiennya Video Call

CERNUSCO SUL NAVIGLIO — Para dokter memang tak hanya mengobati tubuh yang sakit. Semasa pandemi Covid-19, para dokter berupaya membantu pasien mereka yang diisolasi untuk dapat berhubungan dengan keluarga mereka, meski hanya melalui panggilan video atau video call.

Seorang dokter yang memakai alat pelindung melepaskan masker oksigen dari wajah seorang lelaki tua dan mengangkat tablet. Lelaki itu melambaikan tangan dan seorang kerabat di layar tablet memberinya ciuman. Itu berlangsung kurang dari satu menit dan masker oksigen kembali menyala.

"Panggilan video jelas pendek karena ada banyak hal yang harusnya bisa dilakukan. Panggilan ini tanpa rasa karena tidak ada kontak nyata antara orang-orang ketika mereka berbicara. Jadi, jelas semuanya lebih sulit," kata Kepala Ahli Anestesi Rumah Sakit Umboldo Italia utara, Dr Massimo Zambon.

Para dokter di seluruh Italia mengatakan, salah satu hal terultra bagi pasien adalah tidak dapat memiliki orang yang mereka cintai di sisinya karena pembatasan karantina. "Dari sudut pandang psikologis, ini tentu saja merupakan aspek terburuk dari keadaan darurat ini," kata Zambon.

Zambon dan rekan-rekannya menggunakan tablet yang disumbangkan oleh pemerintah kota dan warga pribadi untuk meringankan rasa sakit karena jarak dan kesepian. Sebagian besar pasien berusaha lanjut dan tidak tahu cara menggunakan tablet sehingga staf rumah sakit membantu melakukan panggilan dan membantu mengoperasikannya.

"Saat ini, ini (video call) adalah satu-satunya solusi yang mungkin, cara termudah, dan paling efektif untuk menciptakan kontak antara pasien dan keluarga," kata Zambon.

Upaya melakukan panggilan video untuk keluarga pasien, menurut Zambon, mendapatkan apresiasi oleh pasien yang harus menghadapi perawatan di rumah sakit. Anggota keluarga pasien pun merasa terbantu karena mereka bisa mengetahui kabar orang tercinta.

Rumah Sakit Umboldo yang relatif kecil berada di wilayah Lombardy, yang telah menanggung beban epidemi tersebut. Sekitar 90 persen pasien Umboldo adalah korban virus korona. Sejak krisis dimulai, rumah sakit telah melimpahkan jumlah tempat tidurnya untuk mencoba mengatasinya. ■ Reuters/dwina agustin ed: yeyen rostiyan

Tenaga Medis Kanada Pikirkan Surat Wasiat

■ RIZKY JARAMAYA, DWINA AGUSTIN

TRENTON — Para tenaga medis di Kanada mulai membuat surat wasiat karena khawatir keselamatan mereka. Penyebab kekhawatiran mereka antara lain akibat kekurangan alat pelindung diri (APD) ketika menangani pasien yang terinfeksi virus korona.

Seorang dokter di kota kecil Brighton, Michelle Cohen, telah mendiskusikan perihal surat wasiat itu kepada suaminya. "Saya baru saja membahas hal ini dengan suami saya dan ini adalah hal yang kami semua telah pikirkan," ujar Cohen kepada *Canada Broadcasting Corporation*.

Cohen bekerja di sebuah klinik di Brighton. Nama dia telah masuk ke dalam daftar dokter yang akan dipanggil ke rumah sakit terdekat jika pasien virus korona bertambah. Cohen dan 43 ribu anggota Ontario Medical Association lainnya telah menerima *e-mail* yang memberikan instruksi tentang cara memperbarui atau menulis surat wasiat pada dua pekan lalu.

"Kami jarang memikirkan keselamatan kami sendiri. (Namun), jika kami diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak aman bagi kami, keluarga, komunitas, dan pasien kami, menurut saya banyak orang akan mulai memikirkan hal ini. Tidak ada yang mendaftar untuk melakukan misi bunuh diri," ujar Cohen.

Laman *Anadold Agency* melaporkan, setidaknya lebih dari 450 petugas kesehatan di Ontario positif terinfeksi virus korona per 6 April. Ontario adalah populasi terpadat di 10 provinsi Kanada dan wilayah ini mulai kehabisan peralatan perlindungan pribadi. Pemerintah Ontario menyatakan, stok APD hanya bisa digunakan untuk satu minggu lagi.

Sebelumnya, proses pembelian masker dari Amerika Serikat (AS) sempat terkendala. AS menahan kiriman 500 ribu masker dari pesanan empat juta yang akan dikirim untuk Provinsi Ontario. Peristiwa itu inbas dari Presiden AS Donald Trump yang menandatangani penghentian alat pelindung diri agar tidak diekspor pada pekan lalu.

Namun, Kanada berupaya menekan AS agar memenuhi pesanan Kanada akan peralatan medis. Kini Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, bantuan peralatan medis sedang dalam perjalanan. Sekitar 500 ribu masker medis N95 akan dikirim ke Kanada pada Rabu (8/4) dari perusahaan 3M Co yang berbasis di Minnesota, Amerika Serikat (AS). APD itu dipesan oleh Provinsi Ontario untuk membantu memerangi virus korona. ■ Reuters ed: yeyen rostiyan

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PELELANGAN
No.22/5/DPS-PPn2/PENG/B tanggal 8 April 2020

Bank Indonesia akan melaksanakan Pelelangan Penyediaan Infrastruktur Storage HPE untuk EDW ASBI SDMX Bank Indonesia TA 2020 melalui aplikasi e-Procurement Bank Indonesia (<https://eprocmnt.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang lingkup Pekerjaan meliputi:
 - Melakukan penyediaan perangkat hardware;
 - Melakukan implementasi perangkat yang terdiri atas instalasi dan konfigurasi hardware;
 - Melakukan pemeliharaan perangkat yang meliputi Preventive Maintenance (PM) dan Corrective Maintenance (CM).
- Pagu anggaran sebesar **Rp9.190.670.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga tujuh puluh ribu Rupiah)** termasuk PPN 10%.
- Persyaratan Perusahaan untuk menjadi calon peserta pelelangan:
 - Bersifat badan hukum "Perseoran Terbatas" atau badan hukum lainnya;
 - Memperunyai sertifikasi KADIN/Asosiasi Profesi yang masih berlaku dengan salah satu kualifikasi sebagai berikut:

Kode	Klasifikasi	Kualifikasi (Minimal)
KADIN 20501	Jasa Teknologi Informasi	Menengah
KADIN 30501	Teknologi Informasi	Menengah
KADIN 30011	Alat/Peralatan/Suku Cadang : Komputer	Menengah
- Merupakan *Business Partner* dan mendapat dukungan dari *Principal Hardware* untuk pelaksanaan Pekerjaan ini yaitu HPE;
- Memiliki pengalaman penyediaan dan instalasi barang sejenis yaitu Storage HPE;
- Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
- Tidak terdaftar dalam kredit macet dan daftar hitam Bank Indonesia;
- Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengadaan sebelumnya;
- Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara;
- Orang yang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak atas nama badan usaha;
- Memiliki SDM / tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondisi profesional perusahaan / perorangan;
- Memiliki alamat tetap dan jelas;
- Memiliki Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling kurang 1 (satu) tahun terakhir;
- Telah memenuhi kewajiban pajakan tahun terakhir;
- Harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia (<https://eprocmnt.bi.go.id>) dan mengikuti petunjuk dan tata cara pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia tersebut.

IV. Persyaratan Pendaftaran:

- Calon peserta pelelangan harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia.
- Mengunggah (upload) dokumen beserta kelengkapan secara online yang terdiri dari:
 - Surat permohonan menjadi peserta Pelelangan bernomor Rp6.000,00;
 - Sertifikat salah satu Klasifikasi KADIN yang masih berlaku dengan kualifikasi sebagaimana butir III.2.d atas;
 - Surat pernyataan dalam melakukan penyediaan dan instalasi barang sejenis yaitu Storage HPE;
 - Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku atau surat keterangan pengurusan perijinan dari instansi yang berkenaan;
 - Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (minimal) tahun 2018;
 - Bukti pembayaran pajak (minimal) tahun 2018;
 - Dokumen tersebut pada butir IV.2.a dan c dikecik di atas kertas kop perusahaan dengan dibubuhi tanggal, cap perusahaan serta ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 oleh Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan yang berkenaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan).
- Pendaftaran calon peserta dimulai tanggal **9 April s.d 16 April 2020** melalui <https://eprocmnt.bi.go.id>.
- Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah meng-upload dokumen pendaftaran calon peserta Pelelangan secara lengkap serta memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi e-Procurement, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Pelelangan selanjutnya.
- Pelaksanaan Pelelangan ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan.

PANITIA PELELANGAN

JAKARTA

PEMBERITAHUAN

KEHILANGAN

HILANG BPKB HONDA Beat Pop.No.Pol. B-3042-SF.An. Elizabeth Retnaningdyah H

PEMBERITAHUAN

PENGUMUMAN

PEMBUBARAN KOPERASI MAJU BERSAMA. (31/3/2020). Alamat: Jl.Raya Tanjung Barat No.7 Kel: Pejaten Timur, Kec: Pasar Minggu Jaksel 12510. Phak Yang Memiliki Tagihan dapat Mengajukan Tertulis ke Alamat Di Atas,Max 30 hari Sejak Di umumkan. Hub: Supratono & Sudrajat. Di Telp: 021-7813838

INFORMASI

PASANG IKLAN ANDA di Republika Hub : (021) 79184744 dan Email ke iklanrepublika@gmail.com

Pengumuman Pengesahan Perdamalan (Homologasi) PT.GUNUNG GILEAD

Berdasarkan ketentuan Pasal 288 UU No.37 Tahun 2004 tentang Fasilitas dan Penunndan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Pengurus PT.GUNUNG GILEAD (dalam PKPU) mengumumkan Putusan Pengesahan Perdamalan (Homologasi), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/PUS-PPU/2019/PN.Niaga.Sy tertanggal 20 Maret 2020 dengan Ambar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan perjanjian perdamalan tertanggal 19 Maret 2020 sah dan mengikat;
- Menyatakan bahwa dengan pengesahan perjanjian perdamalan tersebut, maka Penunndan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut di atas berakhir;
- Menghukumi debitur/Terhormat Penunndan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan seluruh kreditur yang bersangkutan, untuk mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Perdamalan tersebut diatas;
- Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya berdasarkan Putusan tersebut diatas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta berdasarkan ketentuan Pasal 288 UU No.37 Tahun 2004 tentang Fasilitas dan Penunndan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Penunndan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT.GUNUNG GILEAD (dalam PKPU) dalam perkara No. 20/PUS-PPU/2019/PN.Niaga.Sy tanggal 15 Juli 2019, telah berakhir.

Pengumuman ini berlaku sebagai pemberitahuan kepada Debitur, para Kreditur dan pihak-pihak lain yang berperang untuk menjalankan Putusan Pengesahan Perdamalan (Homologasi) tersebut.

Demikian Pengumuman dan pengakhiran ini saya sampaikan untuk diketahui.

Surabaya, 09 April 2020
Pengurus PT.GUNUNG GILEAD
SUKUR, S.H., M.H

REPUBLIKA REPUBLIKA

INFORMASI

BERLANGGANAN KORAN & EPAPER
021 791 93442
0821 1113 6200

PASANG IKLAN KORAN & ONLINE
021 791 84744

JAKARTA
Jl. Waring Sempit Raya No. 37
Jakarta 12250
Telp: 021 790 3747
Fax: 021 793 0649

BANDUNG
Jl. Merdeka No. 47, Bandung 40114
Telp: 022 2593361-3724364

JATIM, JATENG & DIY
Jl. Pemuda No.1, Kobarbaru, Yogyakarta
0274 998298, 541 9822
Fax 0274-541582

TAJUK

Bantalan Pekerja

Otda, PSBB, dan Mudik

JOSE RIZAL, Pengajar IPDN Kampus Jakarta

Data korona per 7 April 2020 menyebutkan, ada 2.738 kasus positif Covid-19 di Indonesia dengan 2.313 pasien dirawat, sembuh 204 orang, dan 221 meninggal dunia.

Sejumlah peneliti memprediksi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia saat ini belum mencapai puncak.

Beberapa jumlah warga yang bakal terinfeksi? Ada yang menyimpulkan pada kisaran puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang hingga jutaan warga bakal terinfeksi virus korona saat puncak penyebaran.

Tentu kita berharap simulasi tersebut tidak mewujudkan menjadi kenyataan. Jangan sampai prakiraan puluhan ribu saudara-saudara kita sebagian setanah air itu menjadi korban keganasan virus yang semestinya bisa dicegah sejak awal.

Langkah pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diharapkan mampu meredam penyebaran virus korona ini. Demikian pula, dengan mulai diterapkannya PSBB bagi DKI Jakarta per Jumat 10 April besok.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, data penyebaran virus per 8 April sebanyak 1.552 kasus positif korona. Sebanyak 114 pasien meninggal dan 75 orang sembuh.

Duta ini masih berpeluang untuk bertambah hingga beberapa pekan ke depan. Padahal, sebulan setelah kasus pasien pertama pada 2 Maret lalu diumumkan, guncangan dari sisi ekonomi sudah mulai terasa.

Pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai mengurangi ritme kerjanya. Beberapa di antaranya ada yang menyiapkan skenario merumahkan hingga mengurangi karyawan.

Bila tak segera ditanggulangi, bukan tak mungkin ancaman puncak gelombang PHK ini mencapai titik kritis. Krisis ekonomi bisa menyeret pada krisis sosial.

Terutama yang rentan terdampak saat ini adalah sektor usaha mikro kecil menengah. Jika pada krisis moneter 1998 mereka bisa bertahan karena masih bisa berkegiatan, saat krisis pandemi korona ini mereka tak bisa lagi beraktivitas bisnis.

Duta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menyebutkan, sekitar 160 ribu pekerja di Ibu Kota dirumahkan tanpa upah dan terkena PHK sebagai akibat pandemi Covid-19.

Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mesti gerak cepat dan sigap. Jaringan pengaman sosial yang sudah diumumkan Presiden Joko Widodo diharapkan bisa menjadi bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang terdampak krisis korona.

Tak kalah penting adalah bantuan bagi pekerja formal ataupun informal. Mereka ada yang dirumahkan atau di-PHK. Di antara mereka bisa jadi tiba-tiba tak lagi berpenghasilan karena tak punya kerjaan formal.

Upaya insentif khusus melalui BP Jamsostek menggunakan program Kartu Prakerja diharapkan bisa menjadi bantalan yang lain. Program ini mencakup 5,6 juta korban PHK dan pekerja informal yang masuk program Kartu Prakerja.

Mereka diberi dana pelatihan Rp 1 juta per periode pelatihan, dan dana bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan dana hasil pengisian survei Rp 50 ribu per bulan selama tiga bulan.

Pemerintah menyiapkan Rp 110 triliun untuk insentif perlindungan sosial saat korona. Insentif tak hanya Kartu Prakerja dan insentif khusus melalui BP Jamsostek, tapi juga bansos lain. Skenario ini butuh ketepatan sasaran dan transparansi.

Akhir Maret lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan, dalam delapan hari terakhir, 14 ribu orang dari wilayah Jabodetabek mudik menggunakan bus.

Pendapatan yang kian seret di kota-kota besar, terutama di seputaran Jabodetabek adalah motivasi utama para perantau mudik. Kendati diperkirakan berkurang dari tahun sebelumnya, besarnya gelombang mudik 2020 tetap tak bisa dipandang sebelah mata.

Selain mengajukan surat resmi pengusulan penetapan PSBB, pemda diharuskan merumuskan rencana aksi penanganan pandemi korona.

Guna menghindari tumpang tindih kewenangan antardaerah, serta sinkronisasi kebijakan terhadap pemerintah provinsi hingga pusat, rencana aksi tersebut harus mendapatkan persetujuan pusat terlebih dahulu.

Rencana aksi yang diajukan pemda provinsi/kabupaten/kota secara berjenjang disyarkan memuat data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi, data penyebaran kasus menurut waktu, dan data penularan generasi kedua dan ketiga.

Selain mengajukan surat resmi pengusulan penetapan PSBB, pemda diharuskan merumuskan rencana aksi penanganan pandemi korona.

Guna menghindari tumpang tindih kewenangan antardaerah, serta sinkronisasi kebijakan terhadap pemerintah provinsi hingga pusat, rencana aksi tersebut harus mendapatkan persetujuan pusat terlebih dahulu.

Rencana aksi yang diajukan pemda provinsi/kabupaten/kota secara berjenjang disyarkan memuat data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi, data penyebaran kasus menurut waktu, dan data penularan generasi kedua dan ketiga.

Selain itu, pemda pengusul juga menyampaikan informasi kesiapan mengenai ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial hingga kesiapan sektor keamanan.

Dalam penetapan PSBB, menteri kesehatan membentuk tim yang bertugas mengkaji epidemiologi terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

Lantas, berdasarkan hasil kajian, tim memberikan rekomendasi penetapan PSBB ke menteri kesehatan. Hingga 6 April 2020, baru DKI Jakarta yang disetujui memberlakukan PSBB mulai Jumat, 10 April 2020.

Daerah yang melaksanakan PSBB berwenang memutuskan masa libur sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya, moda transportasi, tempat atau fasilitas umum hingga pembatasan khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Sayangnya, pedoman PSBB tersebut belum menegaskan pelanggaran mudik. Pemerintah hanya menyeru agar sedapat mungkin masyarakat tak mudik, tetapi tidak melarangnya.

Berlikunya birokrasi penetapan PSBB bagi daerah pengusul, hendaknya tak membuat pemda ragu bersikap. Prinsip pemberian otda dimaksudkan untuk mengatur dan mengurusi situasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah.

Apalagi, dalam masa darurat bencana, aksi cepat pemda mengatasi pandemi sangat diharapkan. Atas nama perlindungan masyarakat, pemda bisa mengalihkan pola edukasi anak sekolah, WFH bagi pegawai, bahkan menyuruh umat beragama beribadah di rumah.

Demikian pula, demi mengantisipasi keselamatan kepulauan ribuan warnanya pada masa mudik. Mudik yang pada praktiknya melintasi sejumlah daerah provinsi, kabu-

paten, dan kota tentu menjadi kewenangan pemerintah pusat mengurusnya.

Agar efektif pelaksanaannya, dituntut koordinasi dan komunikasi intens antarlapas pemda hingga pusat.

Keterbatasan APBD dalam membangun pusat-pusat pemeriksaan dan karantina pemudik di titik-titik perbatasan, dapat dilakukan melalui pola kerja sama antardaerah atau melibatkan peran swasta dan masyarakat.

Tindakan preventif tak kalah penting seiring tindakan kuratif. Terbukanya informasi mesti terjalih baik antara pemerintah, warga setempat, dan pemudik.

Pemerintah harus memberikan informasi menyeluruh mengenai hal yang wajib dilakukan pemudik selama perjalanan hingga tiba di daerahnya, serta tentu saja pemahaman cukup pada warga setempat agar menerima keplangan pemudik.

Ini untuk menghindari miskomunikasi antara warga setempat dan pemudik. Pemudik yang ditolak warga, akan jadi masalah baru. Karena itu, harus dijumpai sejak awal sehingga pemudik dapat difasilitasi sebagaimana protokol yang berlaku.

Bukan lantas telantar dengan tidur di terminal, masjid, atau pasar karena terkatung-katung ditolak warga. Masuk kampung dilarang warga, untuk kembali lagi ke kota sudah kehabisan ongkos.

Di lain pihak, pemudik tidak perlu takut dan malu melaporkan diri di pos-pos pemeriksaan, mendapat status ODP dengan kewajiban harus mengisolasi diri selama 14 hari. Pemda setempat juga perlu menunjukkan keseriusan dalam menegakkan kedisiplinan para pemudik, yakni dengan memastikan keberadaan petugas lapangan hingga ketersediaan perlengkapan pendukung.

Pada akhirnya, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga dalam mengoreksi kembali akselerasi roda birokrasi pemerintahan. Agar ke depan, pemerintah dapat bergerak semakin tangkas guna menyikapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan cepat berubah.

Hampir seluruh bangsa di dunia tertegun menghadapi kecepatan penularan virus Covid-19. Sebagian besar berita membahas virus yang telah merengut nyawa puluhan ribu manusia di banyak negara tersebut.

Masing-masing negara melakukan tindakan pencegahan untuk mengatasi penyakit yang telah ditetapkan sebagai pandemi, dengan cara berbeda-beda walaupun WHO telah memberikan arahan yang baku secara global.

Pertama, negara yang sejak awal mengambil langkah ekstrem menutup total atau lockdown wilayah yang menjadi sumber munculnya virus ini dan mewajibkan penduduknya untuk tinggal di rumah sebagaimana di Cina.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini konsekuensinya berat. Semua kegiatan, bisnis, sekolah, pelayanan umum dihentikan. Negara berusaha menyediakan kebutuhan hidup masyarakat selama karantina.

Langkah ini sempat dikritik melanggar HAM karena dianggap membatasi kebebasan, seakan memperlakukan rakyatnya sebagai tabanan rumah.

Parana tenaga medis bekerja dengan alat dan proteksi diri cukup sehingga mereka tak ragu berada di garis depan menangani para korban di berbagai rumah sakit khusus. Kecepatan dan ketegasan bertindak ini terbukti dapat mengatasi musibah ini dengan lebih cepat.

Kedua, sebagian negara lagi menerapkan langkah sama dengan mengimbau untuk tinggal di rumah, menghindari kontak fisik, social distancing, dan selalu mencuci tangan, tetapi lebih longgar. Ternyata cara ini tak mampu menahan penyebaran virus yang makin masif.

Ini karena longgarnya peraturan dan tidak adanya disiplin masyarakat. Setelah tahapan ini dilalui tanpa menunjukkan hasil, barulah pemerintah menerapkan isolasi wilayah yang ketat dengan memperhitungkan risiko turberuk bagi kegiatan ekonominya.

Walaupun dianggap terlambat, langkah ini masih dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Kondisi demikian dialami sebagian negara-negara Eropa. Banyak korban tak tertolong, baik dokter dan paramedis maupun pasien karena kapasitas rumah sakit yang terbatas.

Ketiga, negara yang awalnya berkeyakinan negaranya aman dari musibah ini dan menganggap musibah ini tidak akan menjang sampai mereka. Keyakinan bahwa tinggal di negara tropis bisa terhindar dari wabah ini ternyata sama sekali tidak benar.

Setelah wabah ini mucul lewat mobilitas orang dari luar, ataupun antarwilayah, dan penularan meluas ke berbagai daerah, baru mereka membuat tindakan pencegahan.

Langkah-langkah awal yang terlibat menggecilkan problem ini, menjadikan kesalahan fatal dan kondisi memburuk melesar ke berbagai lini kehidupan. Pemerintah seakan terganggu mengatasinya karena virus telah menjang korban lebih banyak.

Korona menjadi nama paling menakutkan ada banyak jenis penyakit yang menyebabkan kematian dengan persentase lebih tinggi.

Namun, karena virus ini sangat cepat penularannya, Covid-19 menjadi lebih berbahaya dan menakutkan sehingga masing-masing orang merasa penyakit ini makin mengedat kepada dirinya.

Perdebatan tak berujung di kalangan ahli berlanjut, dari mana asal virus ini, apakah dari hewan liar yang dikonsumsi manusia atau kebocoran laboratorium senjata biologi yang diubah dengan teknologi rekayasa genetika menjadi virus baru yang belum ada obatnya.

Sebagai manusia yang beriman, kita percaya teror virus yang tak tampak wujudnya ini merupakan teguran bagi umat manusia agar tidak terus lalai dan sadar akan fitrahnya sebagai makhluk Allah SWT yang harus menjaga bumi dari kerusakan yang dibuatnya.

Dalam Alquran, Allah berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." (QS Assyura: 30).

Di sisi lain, beberapa ahli lingkungan melaporkan, di belahan dunia yang terdampak virus korona ini, alam lingkungan sekitarnya menjadi lebih bersih dari pencemaran, baik air maupun udara. Seakan setiap kurun tertentu, bumi mengoreksi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik.

Pada saat semua orang diwajibkan tinggal di rumah agar dapat memotong mata rantai penularan penyakit ini, sesungguhnya adalah waktu yang baik untuk manusia bermuhasabah.

Sebagai seorang Muslim, harus menyiapkan diri memasuki bulan suci Ramadhan dengan suasana berbeda, yaitu kesiandirian bersama Sang Khalqul thaima kehilangan kekhayal dan dalam ibadah.

Di sisi terlihat, korona menjadi dua sisi mata uang, antara ketakutan dan harapan juga antara musibah dan hikmah. Seyogyanya kita mendoakan para pahlawan medis di garis depan agar terlindung dari penyakit dan korban syahid agar arwahnya diterima Allah SWT dengan keistimewaan para syuhada.

Korona, Dua Sisi Mata Uang

ZEN UMAR B SUMAITH, Ketua Umum Rabithah Alawiyah

SUARAPUBLIKA

Butuh Solusi Cepat dan Tepat

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia terus meluas. Berdasarkan data per 7 April 2020, jumlah kasus positif korona mencapai 2.738 kasus, dengan 204 pasien sembuh dan 221 pasien meninggal dunia.

Sebagai solusi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disertai jargon physical distancing. Solusi ini dipilih karena dirasa pas untuk kultur masyarakat kita. Sayangnya, di lapangan kebijakan ini sulit diukur efektifitasnya.

Bahkan, masyarakat luas tidak memiliki gambaran jelas tentang PSBB. Padahal, sejatinya kita berkejaran dengan waktu, mengingat penyebaran virus yang luar biasa masif. Butuh solusi tepat dan cepat.

Jangan sampai, pengorbanan tenaga medis yang berjuang mati-matian di garda terdepan, tidak diimbangi kebijakan yang sejalan. Maka itu, memutus rantai penularan sudah semestinya menjadi prioritas, ketimbang hal lain termasuk berhitung secara ekonomi.

Suti Khotimah, Kuningan Jabar

REPUBLIKA

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor perbaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengantar, dan sudut pandang surat kabar negeri ini.

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun.

MAHAKA GROUP

Footer containing contact information, staff list, and subscription rates for Republika.



RONALDINHO DIBEBASKAN

Mantan bintang sepak bola Brasil Ronaldinho (baju putih) dibebaskan dari penjara di Paraguay pada Selasa (7/4), setelah menjalani sidang pemeriksaan dan membayar uang jaminan. Ronaldinho sebelumnya ditahan pada 5 Maret 2020 lantaran menggunakan paspor palsu saat masuk Paraguay. Ronaldinho akan menjalani tahanan rumah di Hotel Palmarosa, Asuncion, Paraguay.

Di Rumah Saja Ala Timnas Basket

■ FITRIANTO

JAKARTA — Berhentinya aktivitas olahraga di Tanah Air berimbas kepada para personel tim nasional basket putra Indonesia. Pelatih dan pemain timnas basket kini lebih banyak berdiam di rumah menghabiskan waktu bersama keluarga. "Seharusnya kita ada pemantauan pemain muda bulan ini, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Saya sendiri menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga," kata asisten pelatih Wahyu Widayat Jati saat dihubungi *Republika*, Rabu (8/4).

Untuk menjaga kebugaran, Wahyu berolahraga ringan. Ia sempat mengunggah video berlatih beban dengan menggunakan sepeda kecil anaknya.



● Arki Dikania Wisnu

Asisten pelatih lainnya Youbel Sondakh juga menyampaikan hal serupa. "Stay at home saja, bergaul dengan keluarga, kemarin-kemarin kan agak kurang," ujar Youbel. Walau di rumah, Youbel tak diam. Ia menambah ilmu kepelatihan basket dengan berselancar di dunia maya, mencari informasi yang relevan dengan tugasnya.

Bagi atlet, saat ini menjadi kesempatan memulihkan diri. Sebab, timnas basket punya jadwal latihan yang padat. Arki Dikania Wisnu mengaku berada rumah lebih banyak dari biasanya dan menghabiskan waktu dengan keluarganya. "Saya bermain dengan putri saya, juga memberinya pekerjaan sekolah kecil sehingga tidak hanya bermain sepanjang hari. Saya memasak untuk keluarga, membersihkan rumah, melakukan beberapa latihan agar tetap aktif dan bugar, juga membaca," kata Arki.

Meski sedang tidak ada kegiatan dan program dari pelatih, Arki mengaku bertangung jawab untuk menjaga kebugaran. *Point guard* Andakara Prastawa Dhayka juga memanfaatkan waktu bersama putri kecilnya, Naomi Hope Lunador, yang baru lahir pada awal Januari lalu. Pras dengan senang menjalankan tugas sebagai ayah baru. Untuk menjaga kebugaran tubuh, Pras mengaku hanya berlatih *push-up*, *pull-up*, *sit-up*, untuk memperkuat otot. "Untuk teknik, paling dribel bola saja," kata Pras. ■ *ed: israr itah*

FIFA Ubah Aturan Kontrak dan Transfer

FIFA memberi izin kontrak pemain diperpanjang melebihi 30 Juni hingga akhir musim.

■ ANGGORO PRAMUDYA

JAKARTA — Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dipaksa bekerja keras meniadakan dampak pandemi virus korona saat ini. Sebab, selain berhentinya kompetisi sepak bola di dunia, FIFA juga harus berhadapan dengan berbagai agenda turnamen besar mereka yang *motor*. Satu masalah krusial lagi, mengubah beberapa kebijakan terkait transfer dan kontrak kerja pemain.

Tertundanya kompetisi karena pandemi Covid-19 menyebabkan kebingungan soal transfer dan kontrak pemain sepak bola. Bursa transfer musim panas yang sedianya dibuka pada awal Juli terancam tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Begitu juga dengan kontrak pemain yang biasanya habis pada 30 Juni. Boleh jadi, saat kontrak habis, kompetisi

masih berjalan.

Alhasil, FIFA memilih untuk lebih dahulu menjamin beberapa elemen yang siap untuk diputuskan, yakni berkaitan dengan kontrak pemain dan sistem transfer secara umum. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (7/4), FIFA memberi izin kontrak pemain diperpanjang melebihi 30 Juni hingga akhir musim. FIFA juga memindahkan jendela transfer ke waktu yang tepat untuk klub dan pemain.

Nantinya, dalam memutuskan hal terkait kontrak dan transfer pemain, FIFA akan berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk perwakilan klub, pemain, liga, asosiasi nasional, dan konfederasi. "Kontrak pemain yang akan berakhir pada 30 Juni akan diperpanjang hingga musim benar-benar berakhir. Ini harus sejalan dengan niat awal para pihak

ketika kontrak ditandatangani dan juga harus menjaga integritas serta stabilitas olahraga," bunyi pernyataan yang dikutip dari *Football Italia*, Rabu (8/4).

Prinsip yang sama juga berlaku untuk kontrak yang berlaku ketika musim baru dimulai. Seperti perjanjian antara Chelsea dan Ajax soal transfer Hakim Ziyech yang mulai berlaku Juli 2020. Itu berarti berlakunya kontrak tersebut ditunda sampai musim berikutnya benar-benar dimulai.

Sepak bola, seperti sektor ekonomi lainnya, harus menemukan solusi yang adil dan setara yang dapat disesuaikan dengan keadaan saat ini. Karena itu, FIFA sangat mendorong klub dan pemain untuk bekerja sama demi menemukan kesepakatan dan solusi selama periode menyulitkan.

"FIFA merekomendasikan untuk melihat semua aspek dari setiap situasi dengan cara yang adil, termasuk tindakan pemerintah apa yang ada untuk mendukung klub dan pemain, apakah pembayaran harus ditangguhkan atau dikurangi dan cakupan asuransi apa

yang mungkin ada untuk para pemain," sebut FIFA.

Kasus di atas setidaknya tengah dialami beberapa bintang lapangan hijau, seperti dua pemain Chelsea, Pedro Rodriguez dan Willian, Adam Lallana di Liverpool, serta Zlatan Ibrahimovic yang hanya memperkuat AC Milan dengan durasi kontrak selama enam bulan hingga Juni mendatang.

Señasib dengan pemain di atas, penyerang Paris Saint-Germain (PSG) Mauro Icardi juga akan kembali dari masa pinjamannya selama satu musim. Namun, Icardi, melalui agennya, Wanda Nara, menyatakan bersedia kembali merumput di pentas sepak bola Seri A Liga Italia.

Di sisi lain, tak cuma menyoal kontrak pemain yang habis per 30 Juni lalu diperpanjang hingga kompetisi benar-benar tuntas. Bursa transfer juga akan mengikuti kebijakan tersebut dengan lebih fleksibel dan memperbolehkan jendela transfer jatuh pada masa di antara akhir musim dan awal musim berikutnya.

■ *ed: israr itah*

Giliran GP Kanada Ditunda

■ MUHAMMAD IKHWANUDDIN

JAKARTA — Dampak virus korona ke ajang Formula Satu (F1) semakin terasa ketika penyesuaian Grand Prix (GP) Kanada mengumumkan penundaan balap yang seharusnya digelar pada 12-14 Juni 2020. Otoritas F1 di Kanada enggan mengambil risiko lebih besar jika tetap menggelar balapan di tengah pandemi Covid-19.

Sikap Kanada terkait penundaan balapan diambil setelah penyelenggara F1 menyatakan sedang membahas revisi kalender balap musim 2020 bersama para promotor GP di setiap negara. "Penundaan ini bukanlah keputusan yang mudah," kata Francois Dumontier, CEO GP F1 Kanada, dikutip dari laman resmi F1, Rabu (8/4).

Panitia GP Kanada menyatakan, keputusan diambil setelah berkoordinasi

dengan operator F1, pemerintah Kota Montreal, otoritas pariwisata Montreal, serta pemerintah provinsi dan federal setempat. Pihaknya juga telah menerima perintah yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan publik mengenai dampak langsung dari pandemi Covid-19. "Kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka di Sirkuit Gilles-Villeneuve segera setelah aman untuk melakukannya," kata Francois.

Di satu sisi, Francois menegaskan, tiket masuk penonton yang sudah dibeli tetap berlaku meski waktu balap berganti. Pihaknya akan memberi informasi lanjutan terkait konfirmasi tanggal balapan yang sudah direvisi.

Dari 22 seri yang dijadwalkan pada 2020, ada sembilan balapan yang terdampak Covid-19 sehingga tak digelar sesuai jadwal. GP Kanada menjadi balapan ketujuh yang ditunda selain Bahrain, Vietnam, Cina, Belanda, Spanyol, dan Azerbaijan. Sedangkan, dua seri balap di Australia dan Monaco



● Grand Prix Formula Satu (F1) Kanada 2020 diundur akibat pandemi korona. Tampak GP Kanada pada musim 2019.

resmi dibatalkan menyusul krisis global yang terdampak Covid-19 di berbagai sektor.

Operator F1 dan Federasi Balap Mobil Dunia (FIA) juga sepakat menunda seluruh aktivitas atau *shutdown* dan memperpanjang masa dari 21 hari menjadi 35 hari. Selama masa tersebut pada Maret, April, dan Mei, seluruh tim

tidak diperbolehkan melakukan segala kegiatan terkait dengan pengembangan mobil balap mereka.

Penundaan seri balap Kanada sekaligus membuat GP Prancis yang akan digelar 28 Juni menjadi pembuka musim 2020, lalu dilanjutkan GP Austria pada awal Juli. Perubahan jadwal yang belum pasti pun melahirkan ide-ide lain

SERI F1 YANG MASIH SESUAI JADWAL

- 28 Juni GP Prancis
- 5 Juli GP Austria
- 19 Juli GP Inggris
- 2 Agustus GP Hungaria
- 30 Agustus GP Belgia
- 6 September GP Italia
- 20 September GP Singapura
- 27 September GP Rusia
- 11 Oktober GP Jepang
- 25 Oktober GP AS
- 1 November GP Meksiko
- 15 November GP Brasil
- 29 November GP Abu Dhabi

untuk tetap menuntaskan musim balap.

Penasihat tim Red Bull, Helmut Marko, memberi saran agar GP Austria digelar dua kali untuk mengganti seri lain yang dibatalkan atau ditunda. Jika memungkinkan, katanya, balapan di Austria jilid kedua dapat bergulir dengan menakar garis start dan finis agar membedakan rute yang diambil. Namun, ia tetap sangsi hal itu tak akan menopang musim balap secara signifikan.

■ *ed: israr itah*

Atalanta, Sejarah Tertunda, dan Perjuangan Kota Bergamo

■ OLEH EKO SUPRIYADI

Pekan ini, jalan-jalan di Kota Bergamo semestinya bisung oleh antusiasme pendukung Atalanta kala mempersiapkan pertandingan terbesar mereka dalam sejarah klub. Sebab, La Dea seharusnya memainkan laga perempat final Liga Champions. Namun, warga Bergamo harus menunda perayaan bersejarah tersebut. Sebab, kota dekat pegunungan Alpen itu kini bak tanpa penghuni karena wabah virus korona.

Tak ada orang di jalanan daerah yang hanya berjarak 45 km dari Kota Milan. Cuma ada suara sirene ambulans dan lonceng gereja yang dibunyikan saat ada korban Covid-19 meninggal. Bergamo menjadi kota paling parah dihajar Covid-19 di regional Lombardy. Sekarang sudah masuk pekan

keenam setelah Atalanta membenamkan Valencia, 4-1, di San Siro pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Duel yang meminjam markas AC Milan itu diyakini berperan besar sebagai awal terjadinya penyebaran massal virus yang berawal dari Wuhan, Cina.

Atalanta kemudian memenangkan leg kedua atas Valencia meski laga dimainkan tanpa penonton, yang memastikan Duvan Zapata cs lolos ke perempat final. Meski saat itu semua ajang olahraga Italia telah dihentikan, Atalanta diizinkan menuju Spanyol. Sekitar 2.000 fan Valencia berkumpul di sekitar stadion yang tertutup. Suara pendukung Valencia itu pun terdengar gemuruh ketika Valencia membalikkan keadaan menjadi 3-2 sebelum akhirnya La Dea memenangkan pertandingan 4-3 ketika Josip Ilicic mencetak empat gol. Ilicic dan rekan setimnya merayakan

keberhasilan di stadion kosong sambil memegang kaus bertuliskan, "Bergamo, ini untuk kalian, jangan menyerah."

Namun, kali ini tak ada pesta penyambutan di Bergamo. Klub meminta fan tinggal di rumah. "Kami senang selama satu jam sebelum kembali ke Kota Bergamo. Saya tak menyangka harus berhadapan dengan situasi ini," kata gelandang Atalanta, Marten de Roon, dikutip dari *BBC*, Rabu (8/4).

Ia menceritakan, jalanan benar-benar kosong. Semua yang terdengar hanya suara ambulans dan lonceng gereja yang berbunyi saat ada orang yang meninggal. Bergamo berubah menjadi episternum virus korona di Italia.

Di kota di mana setiap anak lahir mendapatkan kiriman susu gratis serta jersey Atalanta dari manajemen klub, kini harus berjuang melewati badai karena pandemi Covid-19.

Rumah sakit sampai harus menolak pasien karena kapasitas yang tak memadai, sementara truk militer telah dipanggil untuk mengangkut peti mati ke krematorium di luar kota. Di Provinsi Bergamo, dengan populasi 1,1 juta, ada 2.060 kematian tercatat sepanjang Maret. Zaccaria Cometti, penjaga gawang dalam skuat Atalanta yang menjuarai Coppa Italia pada 1963, termasuk korban meninggal pekan lalu.

Namun, tragedi tersebut telah memobilisasi penggemar Atalanta. Sekitar 1.200 fan yang menerima pengembalian uang tiket pertandingan leg kedua melawan Valencia menyumbangkan uang itu ke rumah sakit dan panti jompo setempat. Total terkumpul 65 ribu euro (Rp 1,1 miliar). Ilicic juga menyumbangkan bola pertandingan saat ia mencetak empat gol ke gawang Valencia untuk dilelang.

"Di kota dan provinsi kami, ada pahlawan yang menghadapi saat ini, bekerja dengan peralatan yang tidak mencukupi dan jadwal kerja yang melahukan untuk kesehatan semua orang," bunyi sebuah unggahan di halaman *Facebook* untuk kelompok pendukung Curva Nord Atalanta.

Rumah sakit sementara yang berisi 200 tempat tidur dibangun dalam 10 hari. Atalanta dan sponsor utama mereka membeli peralatan, sementara anggota Curva Nord membantu memangganya. Zapata pun berusaha menyanggati para penggemar Atalanta. "Kita akan menggelar pesta besar bersama pada akhir masa kelam ini," katanya.

Tak ada yang tahu kapan itu terjadi. Yang pasti, warga Kota Bergamo akan lebih kuat dan makin bersatu setelah musibah ini. ■ *ed: israr itah*

PSBB Bakal Meluas

Daerah di Riau, Jawa Barat, Banten, Papua, dan Papua Barat ajukan PSBB.

■ DESSY SUCIATI SAPUTRI,
ARIE LUKIHARDIANTI

JAKARTA — Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan, pemerintah sejauh ini telah menerima proposal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jika dikabulkan, nantinya daerah yang menerapkan PSBB akan meluas.

Di antara yang meminta PSBB sejauh ini adalah wilayah yang berbatasan dengan ibu kota DKI Jakarta, yakni Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan. "Itu yang mereka mengatakan sudah mengajukan, tapi saya belum lihat suratnya," kata Yurianto, Rabu (8/4).

Selain surat resmi pengajuan PSBB diserahkan, tim yang melibatkan beberapa kementerian akan melakukan kajian. Mereka akan menilai perlu atau tidaknya penetapan PSBB berdasarkan kasus, terjadinya transmisi lokal, dan lain-lain. "Ya kalau kita menilainya kita cuma butuh sehari. Katakan datanya kan sudah ada semua," kata dia.

Setelah melakukan pengkajian, tim penilai juga akan menanyakan kepada masing-masing daerah terkait rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan.

"Ya setelah kita nilai kan kita tanya. Kan ini yang menilai bukan hanya Ke-

menkes, gabungan kementerian yang lain kan yang nanti juga akan memberikan rekomendasi. Ini bukan hanya masalah kesehatan, ini kompleks masalahnya, macam-macam," kata Yurianto.

Selain wilayah-wilayah tersebut, tiga daerah di Papua Barat dan Papua juga telah mengajukan status PSBB kepada pemerintah pusat. "Sorong, Fakfak, Mimika yang sudah mengajukan," kata Yurianto. Selain itu, daerah lain yang akan mengajukan penetapan PSBB, yakni di wilayah Dumai, Riau.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan ada beberapa syarat atau kondisi yang harus dipenuhi apabila daerah ingin mendapatkan status PSBB.

Pertama, menurut dia, ada peningkatan jumlah kasus dan kematian, penyebaran kasus secara cepat dalam kurun waktu tertentu, dan bukti terjadi transmisi lokal. Peningkatan jumlah kasus dan kematian dapat diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi.

Sementara itu, kecepatan penyebaran Covid-19, menurut dia, dilakukan dengan pengamatan penyebaran secara harian ataupun mingguan. Transmisi lokal harus menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 telah bersirkulasi di daerahnya, bukan merupakan kasus dari daerah lain.

"Syarat dan kondisi itu dapat dipenuhi dengan melakukan kajian mendalam dan analisis. Jika itu telah dipenuhi, kepala daerah ataupun ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Kementerian Kesehatan," ujar Daud kepada wartawan, Rabu (8/4).

Pemohonan, menurut dia, dapat disampaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sebelum itu, kepala daerah harus berkonsultasi lebih dulu dengan gubernur dan surat permohonan penetapan PSBB ditembuskan kepada gubernur. Dia mengajukannya, di Jabar, lima daerah, yakni Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bogor, akan mengajukan permohonan status PSBB kepada pemerintah pusat bersama.

Daud mengatakan, PSBB tidak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. PSBB setidaknya meliputi peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum ataupun area publik. "Ada beberapa sektor yang tetap beroperasi meski status PSBB sudah turun," katanya.

Dia mengatakan, beberapa sektor yang tetap beroperasi meski status PSBB sudah turun, seperti pemerintahan, layanan dan industri kesehatan, pangan, energi, komunikasi, logistik distribusi barang, dan sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. "Ambil contoh retail, toko kelontong, dan warung, bisa beroperasi," katanya. ■ antara ed: fitriyanzamzami



RESONANSI

■ OLEH AZYUMARDI AZRA

Gagap Menghadapi Wabah Korona

Wabah pandemi secara global sampai pertengahan pekan ini (8/4/2020) sudah menjangkiti sekitar satu setengah juta warga dunia dan menewaskan lebih 80 ribu orang. Penyebarannya tidak bisa terduga; tampaknya perjalanan waktu saja yang membuat kurva penyebaran wabah korona ini sedikit demi sedikit menjadi landai.

Menghadapi pandemi korona, kebanyakan pemerintah di berbagai negara gagap dan megap-megap untuk menemukan cara yang mereka anggap efektif mengatasi wabah korona. Sementara itu, korban terus berjatuhan, mereka masih saja tetap gagap menghadapi wabah korona.

Bagaimana Pemerintah Indonesia? Semula ketika mencermati perkembangan cepat wabah korona dari Wuhan, Cina Daratan yang kemudian segera menyebar ke Korea Selatan sepanjang Januari-Februari, kalangan pejabat tinggi Indonesia mengeluarkan berbagai pernyataan yang bernada mengabaikan dan memandang enteng Covid-19.

Tidak perlu mengulangi berbagai pernyataan mengentengkan dan bernada takabur itu di sini. Yang jelas sikap meremehkan membuat Pemerintah Indonesia laai mempersiapkan negara dan warganya menghadapi wabah korona. Indonesia kehilangan waktu dua bulan sebelum akhirnya Presiden Jokowi pada 2 Maret mengumumkan adanya wabah Indonesia yang positif menjadi virus korona.

Sejak pengakuan itu, Pemerintah Indonesia terlihat gagap menghadapi musibah wabah korona yang menyebar cepat ke seluruh penjuru Tanah Air. Bukan hanya itu, Indonesia seolah kehilangan kepemimpinan; hampir tidak terlihat ekspresi kepemimpinan kuat yang diperlukan pada masa krisis; yang mampu membawa negara dan bangsa keluar dari bencana lebih parah.

Sebaliknya, yang terlihat adalah silang pendapat di antara para pejabat tinggi: antara Presiden dan menteri, antara sesama menteri, antara jubiir presiden dan menteri; antara pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten.

Semua ini menciptakan apa yang disebut Wijayanto sebagai "blunder" Pemerintahan Jokowi. Ada 13 pernyataan blunder pada masa prakrisis; empat blunder pada awal krisis; dan 20 pernyataan blunder pada masa krisis (Center for Media and Democracy, LP3ES: 7/4/2020). Fenomena ini menyebabkan peningkatan sentimen negatif (66,3 persen) terhadap pemerintah seperti diungkap Riset Big Data Indef (31/3/2020).

Perbedaan pendapat terus berlanjut-lurut di kalangan kepemimpinan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan membentuk penyebaran wabah korona: apakah menerapkan 'pungungan ketat' (lockdown) atau 'karantina wilayah' atau 'karantina daerah'.

Tanpa menunggu 'arahan' pemerintah pusat, beberapa daerah, seperti Papua atau Kota Tegay menerapkan semacam lockdown atau 'karantina wilayah'. Daerah lain semacam Aceh dan Bekasi menerapkan 'jam malam'.

Di tengah ketidakjelasan, Presiden Jokowi sempat menyinggung tentang kemungkinan pemberlakuan 'darurat sipil' jika keadaan negara dan bangsa memburuk akibat wabah korona. Banjir protes muncul dari berbagai sektor masyarakat yang melihat 'darurat sipil' sebagai berlebihan dan berbahaya bagi kehidupan publik.

Setelah berada dalam ketidakpastian sepanjang Maret, barulah pada akhir bulan (31/3/2020), Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah (PP). PP ini berisi pemberlakuan 'Pembatasan Sosial Berskala Besar' (PSBB).

Namun, PP tentang PSBB ini tampak tidak mencerminkan respons cepat terhadap keadaan krisis—tidak terlihat 'sense of crisis'. Ada macam-macam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi daerah sebelum permintaan pemberlakuan PSBB dapat disetujui Kementerian Kesehatan.

Di sini terlihat cara pandang dan perilaku *business as usual* dengan memberlakukan birokratisasi dan administrasi yang menyulitkan. Terlihat prinsip yang diberlakukan adalah: "Jika bisa dipersulit kenapa dipersulit".

Ketiadaan kepemimpinan yang jelas, tegas, dan bisa bergerak cepat itulah yang membuat gubernur atau wali kota atau bupati mengambil jalan sendiri. Menjelang PP PSBB terbit, pemda-pemda harus menghadapi mudiknya warga dalam jumlah besar yang potensial membawa virus korona ke kampung masing-masing; mereka menetapkan kebijakan sendiri.

Pemerintah pusat terlihat seolah tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kebijakan pemda-pemda tertentu. Presiden Jokowi hanya meminta kepada Mendagri Tito Karnavian menertibkan daerah yang mengambil langkah masing-masing. Menghadapi fenomena ini, tak ada alternatif lain kecuali konsolidasi kepemimpinan pemerintah pusat; dan pada saat yang sama tidak lagi membuat blunder. ■

BUMN Perkuat Teknologi

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN, Pertamina, dan Microsoft, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (8/4). Kerja sama tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari satu di antara lima prioritas Kementerian BUMN, yakni kepemimpinan teknologi.

"Saya berharap kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal BUMN untuk menciptakan nilai lebih, mendukung transparansi data dengan menggunakan teknologi strategis dan efisiensi," ujar Erick, kemarin.

Erick menjelaskan, saat ini ada 800 perusahaan BUMN, termasuk anak perusahaan. Erick menilai, apabila tetap menggunakan cara tradisional dalam mengelolanya, BUMN dapat terdisrupsi. Oleh karena itu, Erick memutuskan, membangun kemitraan dengan Microsoft untuk membantu BUMN dalam mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi terkini, seperti *artificial intelligence* (AI), *internet of things* (IoT), dan *high performance computing* (HPC). Dengan PLN, Microsoft akan mem-

bantu mengembangkan *smart metering*, *smart grid management*, *smart supply chain*, *big data analytic*, dan *executive dashboard*. Tujuannya agar PLN bisa lebih efektif dan efisien. Sedangkan dengan Pertamina, Microsoft akan membantu dalam kerja sama untuk efisiensi biaya pengadaan dan *procurement*, untuk mencari sumber-sumber strategis juga pengembangan program filantropis, seperti proyek Al for Earth yang fokus pada keberlanjutan dan dampak perubahan iklim.

Selain itu, Microsoft akan memberikan program pembelajaran kepada PLN dan Pertamina mengenai teknologi digital dan eksplorasi implementasi guna pengembangan sumber daya manusia. Erick mengharapkan kolaborasi ini akan membantu BUMN untuk mengembangkan modernisasi infrastrukturnya, seperti pembangunan pusat data yang *cloud*, arsitektur ulang aplikasi, dan penilaian aset data. "Terima kasih Microsoft atas aktualisasi kolaborasi ini," ucap Erick.

Erick menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman ini menandai pembentukan kolaborasi antara Pertamina, PLN, dan Microsoft mengenai

transformasi digital dan pemberdayaan teknologi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional BUMN, menghasilkan pendapatan yang lebih besar, efisiensi biaya tinggi, meningkatkan integritas data dari hulu ke hilir, serta membawa konsolidasi data yang lebih baik. "Hal ini akan membuat Pertamina dan PLN menjadi perusahaan yang lebih kompetitif dan lebih kuat."

Erick menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman ini mencakup empat tujuan, mulai dari peningkatan kemampuan digitalisasi untuk BUMN, meningkatkan kesiambungan bisnis BUMN, BUMN sebagai *innovation hub*, dan BUMN sebagai tempat pemasaran global (ekosistem mitra).

Proses penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widayawan, Dirut PLN Zulkifli Zaini, President Microsoft Asia Pacific Andrea Della Mattea, dan President Director PT Microsoft Indonesia Haris Iznee yang disaksikan oleh para pejabat Kementerian BUMN. ■ ed:satria kartika yudha

6 Juta Pekerja Dijamin Negara dari hlm 1

Penerima manfaat Kartu Prakerja adalah pencari kerja yang berusia minimal 18 tahun, khususnya untuk pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang terdampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi. Bantuan yang akan diterima peserta Kartu Prakerja mencapai Rp 3,55 juta, terdiri atas biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei Rp 50 ribu sebanyak tiga kali.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenuk Andin Hadiyanto mengatakan, pemberian insentif untuk survei dilakukan dalam rangka mendorong masyarakat terlibat dalam menilai efektivitas program. "Ini kan (Kartu Prakerja) untuk jangka menengah dan panjang, sehingga harus dievaluasi," katanya dalam kesempatan yang sama.

Andin menilai Kartu Prakerja merupakan paket lengkap.

Kartu tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai transfer bantuan pelatihan, juga membantu memastikan jaring pengaman sosial. Dengan kombinasi ini, diharapkan peserta program bisa diegah untuk jatuh ke tingkat kemiskinan.

Agar pemberian bantuan dapat merata dan adil, pemerintah akan melakukan pengecekan kepada peserta. Peserta yang sudah mendapatkan bantuan sosial lain, baik itu berupa program ke-luarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), ataupun bantuan bentuk lain, tidak akan mendapatkan Kartu Prakerja. "Kebijakan tersebut untuk menghindari *double counting* sehingga nanti banyak masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Misalnya, pengemudi ojek online yang biasanya hanya mendapatkan penghasilan harian," kata Andin.

Untuk program Kartu Prakerja dengan skema baru, peme-

rintah telah menganggarkan Rp 20 triliun sampai akhir tahun. Besaran ini naik dua kali lipat dibandingkan pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun.

Gelombang PHK mulai bermunculan di berbagai daerah karena terganggunya kegiatan bisnis. Di DKI Jakarta, sebanyak 162.416 pekerja atau buruh mengalami PHK maupun dirumahkan pada medio 2-4 April.

Pendataan ulang

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans), dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah memerinci, sebanyak 132.297 pekerja atau buruh di 14.697 perusahaan dirumahkan. Kemudian, terdapat 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan yang di PHK. "Sementara ini, pendataan sudah ditutup sesuai arahan dari pemerintah pusat. Kami sudah menyampaikan untuk ada pendataan kembali karena mungkin masih banyak pekerja atau buruh yang belum

terdata," ujar Andri, Rabu (8/4).

Data yang dihimpun Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta telah dilaporkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Kami tinggal menunggu tindak lanjut atau eksekusinya saja dari kementerian," kata Andri.

Ya menambahkan, pendataan ini sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka percepatan dan perluasan implementasi program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah.

Kuota pendataan untuk Jakarta sebanyak 1.646.541 dan baru 162 ribu pekerja yang di data. "Kalau ada arahan lebih lanjut dari kementerian, akan kami infokan lagi," kata dia.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan, hingga 5 April 2019,

tercatat ada 5.047 buruh terkena PHK karena perusahaan atau tempat mereka bekerja terdampak Covid-19. Jumlah perusahaan atau industri terdampak sebanyak 1.476 perusahaan/industri. Sedangkan, jumlah pekerja/buruh terdampak sebanyak 53.465 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar M Ade Afriandi, Rabu, mengatakan, pihaknya telah menyampaikan verifikasi data perusahaan dan buruh terdampak Covid-19 kepada Kemenaker. Dalam laporan itu, jumlah pekerja/buruh di Jabar yang diliburkan sebanyak 34.365 orang dan jumlah pekerja/buruh yang dirumahkan sebanyak 14.053 orang.

"Untuk yang dirumahkan berarti perusahaan sudah ada kekurangan finansial. Kami dorong tidak ada PHK. Dirumahkan itu artinya ada tanggung jawab perusahaan memberikan upah, tetapi besarnya hasil kesepakatan perundingan perusahaan dan serikat pekerja," kata dia.

Para pekerja di Jawa Timur juga merasakan imbas pandemi Covid-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, ada sebanyak 29 perusahaan yang berhenti beroperasi sementara waktu. Akibatnya, perusahaan memutuskan merumahkan karyawan, bahkan melakukan PHK.

Khofifah menjelaskan, ada sekitar 1.923 pekerja di Jatim terkena PHK. "Yang dirumahkan total 16.086 pekerja," kata Khofifah di Surabaya, Rabu (8/4).

Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mengatakan, pekerja yang dirumahkan tidak dipecah, tapi hanya diliburkan. Ia berharap, perusahaan tidak sampai mengambil keputusan PHK. Emil mengaku tengah mengupayakan agar para pekerja yang menjadi korban karena mewabahnya Covid-19 tersebut untuk masuk dalam program Kartu Prakerja. "Mereka yang dirumahkan pun kami sampaikan ke Kemenaker untuk dapat program prakerja," ujar Emil. ■ arie lukihardianti/dadang kurnia/antara ed: satria kartika yudha

Korban Melonjak, Trump Salahkan WHO dari hlm 1

Spanyol dan 135.586 kasus di Italia. Sedangkan, angka kematian di AS berada di posisi ketiga terbanyak di bawah Italia (17.127 kematian) dan Spanyol (14.555 kematian).

Kendati demikian, menurut data Departemen Pemadam Kebakaran New York, jumlah korban meninggal yang sebenarnya di AS bisa jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan pemerintah. Wali Kota New York City Bill de Blasio mengakui, kematian di rumah masing-masing korban memang belum sepenuhnya dihitung.

"Benar untuk berasumsi bahwa sebagian besar terkait dengan virus korona. Dan itu membuat kita semakin sadar dalam arti berapa banyak orang yang kita yang meninggal dunia, berapa banyak keluarga yang menderita, seberapa nyata krisis ini," ujarnya dilansir Reuters, kemarin.

Data Departemen Pemadam Kebakaran New York didasarkan

pada informasi yang dikumpulkan selama panggilan darurat yang melibatkan berhentinya jantung atau pernapasan, disertai demam dan batuk. Tanda-tanda itu adalah gejala khas dari kasus parah Covid-19. Menurut data, total 2.192 kematian di rumah dilaporkan dari 20 Maret hingga 5 April.

Seorang juru bicara Departemen Kesehatan dan Kesehatan Mental Kota New York mengatakan, jumlah kematian resmi hanya mencakup mereka yang menjalani tes yang mengkonfirmasi mereka terinfeksi virus. Juru bicara itu tidak tahu seberapa banyak orang yang meninggal di rumah yang telah diuji virus korona.

Persentase panggilan di mana paramedis tidak dapat menyelamatkan orang belakangan juga naik dari 48 persen menjadi 75 persen. "Seperti tidak pernah berakhir," kata seorang letnan paramedis pemadam kebakaran yang meminta untuk tidak di-

identifikasi kepada Reuters. "Sedangkan, data Departemen Urusan Veteran AS menyatakan, jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di AS telah melampaui total 9.961 tentara tewas dalam perang Revolusi Amerika, Perang 1812, Perang Meksiko, Perang India, Perang Spanyol-Amerika, dan Operasi Desert Shield/Desert Storm di Irak.

Minoritas

USA Today melaporkan, pihak-pihak di AS juga mengkhawatirkan fakta bahwa tingkat kematian dari kalangan minoritas Afrika-Amerika jauh melampaui etnis lain di AS. Golongan tersebut diketahui paling rentan secara ekonomi dan masih kerap mendapatkan diskriminasi.

Sejumlah kota-kota yang paling terdampak di AS merupakan daerah dengan penduduk warga kulit hitam AS yang signifikan, seperti New Orleans, Detroit, dan New York. Selain itu, tingkat persentase kematian yang tak proporsional di kalang-

an Afrika-Amerika juga dicatatkan sejumlah negara bagian.

Di Louisiana, dari 512 kematian yang tercatat, sebanyak 360 atau 70 persen yang meninggal dari etnis Afrika-Amerika. Padahal, jumlah penduduk kulit hitam di wilayah itu kurang dari sepertiga total jumlah penduduk.

Di Illinois, dari 12.262 kasus, hanya 29,4 persen berasal dari golongan Afrika-Amerika. Kendati demikian, persentase tersebut meningkat hampir dua kali lipat (42 persen) saat yang dihitung adalah kematian dari kalangan kulit hitam AS. Sementara, di Michigan yang hanya 14 persen dari total penduduk merupakan warga kulit hitam, sebanyak 41 persen kematian datang dari kalangan tersebut.

Disparitas tersebut tak luput dari perhatian Gedung Putih. "Ini tantangan besar bagi bangsa kita. Kami ingin mencari apa alasan di balik hal tersebut," kata Presiden AS Donald Trump, Selasa waktu setempat.

Berbagai pihak tengah mengkaji alasan Covid-19 bisa sede-

mikian merebak di AS. Beberapa pihak menyalahkan keterlambatan langkah pemerintah Presiden Trump memberlakukan pencegahan dan pengujian massif. Pihak oposisi juga menyoroti kesan meremehkan dampak Covid-19 pada masa-masa awal merebaknya di AS.

Kendati demikian, Presiden Donald Trump belakangan justru menyalahkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ia juga mengancam akan membekukan dana kontribusi untuk lembaga tersebut. AS adalah penyumbang dana terbesar untuk WHO selama ini.

Trump pun menilai WHO sangat "Cina-sentris" dalam pendekatannya. "WHO benar-benar gagal," ujar Trump melalui akun Twitter-nya pada Selasa (7/4). Selain mengancam memangkas dana, Trump pun mempertimbangkan langkah untuk menarik AS dari WHO.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric menolak kritik-kritik tersebut. Menurut dia, WHO telah melakukan pekerjaan luar biasa di ba-

wah kepemimpinan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO membantu negara-negara dengan jutaan peralatan, membuat pelatihan, dan menyediakan pedoman global. "WHO menunjukkan kekuatan sistem kesehatan internasional," ujar Dujarric. WHO belum memberikan komentar atas kritik yang dilayangkan Trump.

WHO menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 30 Januari, hampir sebulan sebelum Trump menyatakan penyebaran virus korona di AS sangat terkendali.

Meski begitu, WHO juga sempat mengecilkan ancaman Covid-19 dengan tidak mengizinkan penutupan perbatasan atau pembatasan perjalanan saat banyak negara, termasuk AS dan Indonesia, mulai mengambil langkah-langkah tersebut. Baru pada 11 Maret WHO menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi. ■ rahma sulistyia ed: fitriyanzamzami

HIKMAH

OLEH AGUS SOPIAN

Bersikap Tenang

Untuk menyikapi wabah Covid-19 yang terus meluas membutuhkan ketenangan. Orang yang tenang tidak akan pernah galau, panik, dan tergesa-gesa dalam menghadapi sesuatu. Dia akan bisa menerima informasi lebih banyak hingga memahami situasi dan dapat mengendalikannya. Selama ini, kebanyakan orang dibuat gelisah, cemas, dan khawatir berlebihan. Dalam situasi seperti ini, kita harus bisa mengendalikan diri, tetap tenang bagaimana pun sulitnya kondisi yang dihadapi. Tenang bukan berarti lamban, tetapi berpikir jernih dan mendalam. Tidak ceroboh, yang ujung-ujungnya membahayakan diri sendiri, terlebih orang lain. Sikap tenang akan membuat kita mudah menerima nasihat, memperhatikan imbauan, dan mengikuti aturan.

Yakin bahwa segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS al-Insyirah: 6).
Sejatinya, ketenangan hanya bisa didapatkan dengan keimanan kepada Allah. Sumbernya adalah ketetapan hati. Ketenangan yang Allah berikan muncul saat hamba-Nya berhadapan dengan rasa takut dan cemas sehingga dia tidak akan merasa terganggu atau bersedih hati. Justru keyakinan dan keimanannya akan semakin bertambah kuat dan kukuh.
Dengan ketenangan yang Allah berikan, seorang mukmin akan selalu siap dan optimistis menghadapi kehidupan. Allah SWT berfirman, "Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke

dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allahlah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS al-Fath: 4).
Mukmin sejati akan menghadapi segala macam situasi dan kondisi dengan tenang. Sebab, hatinya selalu terpaud kepada Allah SWT. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dan tenteram. Allah SWT berfirman, "(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram." (QS ar-Ra'd: 28).
Orang yang beriman akan senantiasa bersikap tenang, sebab segala tindakannya selalu berada dalam

bimbingan-Nya. Inilah yang disampaikan Allah kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Ketika Perang Hunain terjadi, turunan firman Allah dalam surah at-Taubah: 25-28. Saat itu, pasukan kaum Muslimin di sergap pasukan musuh berkekuatan besar di sebuah lembah. Ketika itulah keadaan Muslimin menjadi kacau-balau.
Dalam keadaan terpuak demikian, mereka berbalik surut dengan ketakutan dan kegugupan dalam hati, bahkan ada pula yang lari tunggang-langgang. Sementara, Rasulullah tetap tidak bergerak di tempatnya ditemani beberapa sahabat muhajirin dan anshar di sekelilingnya. Mereka tenang dan atas izin Allah akhirnya menang dalam perang. *Wallahu a'lam.*

BANTUAN UNTUK GURU NGAJI

Lazizmu menerima bantuan dana tunai dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Jakarta, Rabu (8/4). Bantuan ini akan disalurkan kepada para guru ngaji dan mubaligh yang terdampak wabah virus korona (Covid-19).



DOK. LAZIZMU

Bolehkah Petugas Medis tak Berpuasa?

OLEH ANDRIAN SAPUTRA

Ramadhan sudah di depan mata. Menjadi kewajiban bagi seorang Muslim yang telah baligh untuk menjalankan ibadah puasa. Meski demikian, pada Ramadhan tahun ini, beberapa orang dengan profesi tertentu dituntut bekerja ekstra, terutama di antaranya petugas medis dalam merawat pasien-pasien yang terpapar penyakit virus korona (Covid-19).

Untuk melakukan tugas tersebut, petugas medis perlu fisik dan stamina prima. Nah, dengan pekerjaan yang menguras stamina itu, bolehkah seorang petugas medis yang menangani pasien Covid-19 tidak berpuasa? Adakah keringanan bagi mereka agar dapat melaksanakan puasa di lain hari (meng-*qadha* puasa), misalnya ketika wabah Covid-19 telah berakhir?

Jawab pertanyaan ini, Ustaz Wijayanto menerangkan, seorang Muslim yang mempunyai hambatan berat diperbolehkan tidak berpuasa Ramadhan. Kendati demikian, orang tersebut tetap dikenakan kewajiban meng-*qadha* puasa dan membayar fidyah. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam surah al-Baqarah ayat 184 dan 185.

Ustaz Wijayanto menjelaskan, petugas medis tetap berkewajiban meng-*qadha* atau mengganti puasa Ramadhannya di lain waktu. Sebab, halangan yang membuat petugas medis tidak berpuasa tidak bersifat permanen atau terus-menerus.

"Orang Muslim yang berat menjalankan puasa, boleh tidak berpuasa, tapi membayar fidyah. Harus meng-*qadha* karena halangan sesaat, bukan permanen," kata Ustaz Wijayanto.

Ustaz Jeje Zainuddin juga menjelaskan adanya *rukhsah* atau keringanan bagi orang yang bekerja berat untuk tidak berpuasa. Ia menjelaskan, para dokter dan tenaga medis lainnya bisa tergolong orang yang mendapatkan *rukhsah* untuk tidak berpuasa ketika mereka harus bekerja ekstra untuk memberikan penanganan kepada pasien tanpa henti.

Para dokter dan tenaga medis itu, menurut sebagian fukaha, bisa masuk kategori *alladziina yuthiqunahu*, yaitu orang yang sanggup berpuasa tetapi dengan susah payah. Hal ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 184.

ed: wachidah handasah

Kemenag Siapkan Tiga Skenario Haji 2020

Kemenag masih menunggu keputusan Pemerintah Saudi terkait pelaksanaan haji 2020.

ARIF Satrio Nugroho, Zahrotul Oktaviani

JAKARTA — Sebagai dampak dari pandemi virus korona (Covid-19), hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji 1441 H/2020 M. Terkait hal itu, Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan setidaknya tiga skenario sebagai upaya mitigasi.

"Skenario pertama adalah bila haji diselenggarakan dengan kuota normal," kata Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4). Skenario pertama tersebut, menurut Menag, dilakukan bila situasi kondusif dan semua bentuk pelayanan di Arab Saudi sudah berjalan normal.

Skenario itu disiapkan dalam tiap tahap pelaksanaan haji mulai dari berangkat hingga pulang ke Tanah

Air. "Diupayakan dengan meminimalkan sistem dampak Covid-19 hingga ke titik nol," ujar Menag.

Skenario kedua, bila ada pembatasan kuota. Skenario ini mengasumsikan haji tetap diselenggarakan tetapi dengan pembatasan kuota akibat situasi di Arab Saudi yang masih berisiko atau jamaah berisiko bila tetap berangkat ke Tanah Suci. Kuota diperkirakan dikurangi hingga 50 persen dengan pertimbangan ketersediaan ruangan yang cukup untuk menjaga jarak fisik.

"Skenario ini memaksa adanya seleksi mendalam terhadap jamaah haji yang berangkat tahun ini dan petugas yang berangkat. Skenario ini menitikberatkan pada prioritas, menyesuaikan dengan syarat Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi," kata dia.

Adapun skenario ketiga adalah ibadah haji ditunda. Menurut Me-

nas, penyelenggaraan haji bisa ditunda bila Kemenag tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkannya akibat cepatnya perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Jika hal itu terjadi, Pemerintah Indonesia memilih tidak mengirim jamaah haji karena alasan keselamatan atau keamanan.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR tersebut, Menag juga mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 1441 H/2020 M. Meski demikian, Kemenag tetap melakukan persiapan penyelenggaraan haji.

"Sepanjang belum ada pemberitahuan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia tentang pembatalan haji, maka Kemenag tetap melakukan persiapan sesuai jadwal dengan beberapa penyesuaian," kata Menag.

Ia juga menjelaskan, terjadinya wabah Covid-19 membuat beberapa kegiatan persiapan ibadah haji mengalami penyesuaian. Di antaranya pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dilakukan dengan mekanisme

tanpa tatap muka atau *non-teller*.

Pelaksanaan pelatihan petugas haji juga ditunda di enam embarkasi. "Pelaksanaan pelatihan direncanakan jarak jauh dan praktik sebelum keberangkatan," kata Menag.

Penyesuaian lainnya, lanjut Menag, manasik haji dilakukan secara daring dengan memberikan buku manasik lebih awal. Pembayaran kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa pelayanan haji di dalam negeri atau di Arab Saudi juga ditunda.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro meminta Kemenag memberikan informasi kepada para calon jamaah (calhaj) Indonesia terkait rencana haji 2020 tersebut.

Perihal rencana Kemenag untuk membagikan materi bimbingan manasik menggunakan media sosial dan situs resmi Kemenag, ia menyebut cara itu sah saja dilakukan. Terlebih, saat ini hampir setiap wilayah bisa dijangkau kemajuan teknologi.

ed: wachidah handasah



Palang Merah Indonesia

Mahaka untuk Indonesia

DONASI YANG ANDA BERIKAN SANGAT BERARTI BAGI PERJUANGAN KITA MENGALAHKAN COVID-19

#MahakaUntukIndonesia

SALURKAN DONASI ANDA MELALUI:

Bank Central Asia (BCA)
5265309060
a/n PT Mahaka Media TBK

Bank CIMB Niaga Syariah
8 600 666 66 300
a/n PT Republika Media Mandiri



BURSA			KURS			KURS TENGAH DOLAR AS			INDIKATOR		
FTSE 100	5.613,15	91,30							Penjualan DSNG Produsen crude palm oil (CPO) PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) membukukan penjualan Rp 5,74 triliun pada 2019. Jumlah ini meningkat 20,5 persen dari penjualan 2018 yang sebesar Rp 4,76 triliun.		
Dax	10.208,58	148,12							PENJUALAN DSNG Rp 4,76 triliun (2018) vs Rp 5,74 triliun (2019)		
Cac 40	4.336,63	101,63									
Dow Jones	22.653,86	26,13									
Nasdaq	7.887,26	25,98									
Shanghai	2.815,37	5,39									
Hang Seng	23.970,37	282,92									
Nikkei	19.353,24	403,06									
Straits Time	2.539,44	32,45									
IHSG	4.626,70	151,94									

BANTUAN APD

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari (kedua kiri) menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker kepada RSPAD Gatot Subroto yang diterima oleh Letkol Dra. Vinsensia Norma Uli Munte di Jakarta, Rabu (8/4). Mandiri Syariah memberikan bantuan senilai Rp 3,05 miliar berupa 2.500 APD dan 100 ribu masker kepada 105 rumah sakit rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia.



DOK MANDIRI SYARIAH

Jasa Marga Kaji Anggaran Perusahaan

■ RAHAYU SUBEKTI

JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk harus menghadapi dampak dari pandemi virus korona. Trafik di jalan tol mengalami penurunan selama Covid-19 merebak di Tanah Air.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan, saat ini perusahaan sedang menyiapkan langkah untuk menghadapi hal tersebut.

"Penurunan lalu lintas yang berakibat pendapatan tol membuat Jasa Marga harus mengkaji kembali struktur dan anggaran biaya perusahaan," kata Heru kepada *Republika* di Jakarta, Rabu (8/4).

Dia menjelaskan, saat ini Jasa Marga juga terpaksa harus melakukan efisiensi di semua lini. Heru menuturkan, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengejar target EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) perusahaan setelah terdampak virus korona.

"Namun, tentu semua itu kami lakukan dengan tetap mempertahankan pemertahan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol yang telah ditetapkan pemerintah," ujar Heru.

Meskipun begitu, manajemen Jasa Marga belum mengungkapkan berapa angka penurunan lalu lintas selama pandemi korona berlangsung. Hanya, Heru mengakui memang terjadi penurunan lalu lintas dalam kondisi pandemi Covid-19. "Penurunan lalu lintas ini telah memberikan tekanan pada kinerja perseroan pada akhir kuartal satu 2020 ini," ujar Heru.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pendapatan badan usaha jalan tol (BUJT) terdampak pandemi virus korona. Basuki menuturkan, saat ini terdapat penurunan lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan tol.

"Sekarang ini menurut data, LHR-nya turun sekitar 40 sampai 60 persen dari hari normalnya," kata Basuki dalam konferensi video dengan wartawan, Selasa (7/4) lalu.

Basuki menjelaskan, kondisi tersebut dapat memengaruhi penghasilan BUIT. Basuki menuturkan, pihaknya saat ini juga masih terus berdiskusi dengan BUJT terkait dampak lain yang dirasakan karena pandemi virus korona. Bahkan, Basuki juga berencana akan mengusulkan sejumlah opsi relaksasi bagi BUJT.

Basuki mengatakan, masih akan mendiskusikan usulan relaksasi yang akan diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Pertama, mungkin akan meminta relaksasi pembayaran kewajiban BUJT ke bank," ujar Basuki.

Basuki menuturkan, dengan *revenue* BUJT yang berkurang sekitar 40 persen menyebabkan kemampuan untuk membayar kewajiban kepada bank berkurang. Jadi, Basuki menuturkan, paling tidak dapat disusulkan membayar pokok ataupun bunga sesuai dengan *revenue* yang didapatkan.

Basuki juga mengatakan, terjadi perlambatan proses pembebasan lahan. "Ini (keterlambatan pembebasan lahan) bukan karena faktor keuangan, melainkan tanah," kata dia. Sebab, Basuki menuturkan, saat ini musyawarah-musyawarah sangat dilarang dalam rangka pembatasan sosial.

Bank Pantau Potensi NPL

Empat bank BUMN telah merestrukturisasi kredit senilai Rp 28,7 triliun.

■ NOVITA INTAN

JAKARTA — Industri perbankan sudah mulai menjalankan proses penilaian atas pengajuan relaksasi kredit bank atau pinjaman *leasing*. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) di tengah penyebaran virus korona. Hal ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mengikuti kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rully Setiawan mengatakan, perseroan memiliki sejumlah strategi menjaga kesinambungan bisnis pelaku UMKM.

"Kami selalu memonitor berkelanjutan atas kemampuan usaha nasabah UMKM serta intensifikasi pendampingan usaha," katanya kepada *Republika*, Rabu (8/4).

Menurut Rully, emiten berkode saham BMRI di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu juga aktif merekomendasikan kepada para nasabah UMKM sebagai *value chain wholesaler* dan mengenalkan beragam solusi bisnis digital terkini untuk meningkatkan pro-

duktivitas usaha.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan restrukturisasi terhadap lebih dari 134 ribu pelaku UMKM yang terdampak virus korona di Tanah Air.

Sekretaris Perusahaan BRI Amam Sukriyanto mengatakan, restrukturisasi tersebut dilakukan sejak 16 Maret hingga 31 Maret 2020 dengan nilai plafon pinjaman yang direstrukturisasi mencapai Rp 14,9 triliun.

"Skema restrukturisasi yang diberikan BRI untuk masing-masing debitur berbeda disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Dengan catatan, usahanya masih memiliki prospek yang baik dan secara personal debitur memiliki itikad baik atau kooperatif," kata Amam.

Amam memastikan, proses restrukturisasi kredit dilakukan dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan asesmen seberapa besar dampak virus korona terhadap usaha debitur.

"Implementasi relaksasi ini merupakan wujud komitmen BRI yang mendukung pemerintah dan OJK dalam upaya menyelamatkan para pelaku UMKM di Indonesia akibat imbas dari penyebaran virus korona," ujar Amam.

Sebelumnya, OJK mencatat empat bank BUMN telah melakukan restrukturisasi kredit dengan total nilai Rp 28,7 triliun. Adapun empat bank pelat merah tersebut, di antaranya BRI, Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank



Tabungan Negara (Persero) Tbk. BRI merestrukturisasi kredit Rp 14,9 triliun dari 134.258 debitur. Kemudian Bank Mandiri merestrukturisasi Rp 4,1 triliun dari 10.592 debitur. Kemudian ada BNI merestrukturisasi Rp 6,9 triliun dari 6.238 debitur serta BTN senilai Rp 2,8 triliun dari 17.481 debitur.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 168.479 debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit. "Kami tegaskan debitur yang memiliki kemampuan membayar cicilan tidak ikut menunda pembayaran cicilan kredit," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menekankan relaksasi pembayaran kredit bagi

pengemudi daring, sopir taksi, UMKM, dan nelayan akan berjalan efektif mulai April 2020.

OJK menyatakan, industri perbankan tidak perlu membentuk pencadangan kredit bermasalah akibat penyebaran virus korona. Hal ini dimungkinkan jika kredit bermasalah telah memenuhi salah satu syarat penilaian kolektibilitas, yakni ketepatan pembayaran.

OJK menyatakan, otoritas telah membentuk kolektibilitas satu pilar sehingga dapat meringankan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Bagi kredit sampai Rp 10 miliar, ada skema boleh membayar apabila mampu dan mempunyai uang.

■ ed: citra listya rini

■ ed: ed: citra listya rini

Pelindo II: Arus Peti Kemas di Tanjung Priok Turun

■ RAHAYU SUBEKTI

JAKARTA — Arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sepanjang triwulan I-2020 mencapai 1.569 ribu *twenty equivalent units* (TEUs), turun 4,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.638 TEUs.

"Dibandingkan tahun lalu, untuk Februari penurunan arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 5,13 persen, sedangkan di bulan Maret penurunannya 4,2 persen. Memang masih menunjukkan ada penurunan, tetapi persentasenya makin mengecil," kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) IPC Arif Suhartono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/4).

Arif berharap, seiring dengan mulai pulihnya industri Cina, tren arus peti kemas bisa terus meningkat. Pasalnya, selama wabah Covid-19, pengiriman barang ekspor dan impor dari dan ke Negeri Tirai Bambu mengalami gangguan. Padahal, Cina merupakan kontributor utama arus peti kemas inter-

nasional di Pelabuhan Tanjung Priok. "Sekarang aktivitas ekonomi di sana mulai berangsur pulih. Saya berharap kuartal ke depan trennya makin membaik," kata Arif.

Pelindo II atau IPC memiliki 12 cabang pelabuhan yang tersebar di wilayah bagian barat Indonesia, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Panjang, Cirebon, Jambi, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan, akan terus menjaga kelancaran logistik. Hal tersebut perlu dilakukan saat pembatasan sosial dan fisik diberlakukan selama pandemi Covid-19 berlangsung. "Kami juga tetap berkomitmen menjaga kelancaran logistik selama 24 jam tujuh hari penuh sesuai tugas kami," kata Doso.

Doso mengatakan, Pelindo III juga berupaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia, terlebih di lingkungan kerjanya. Dia menegaskan, selama ini pihaknya sudah melakukan

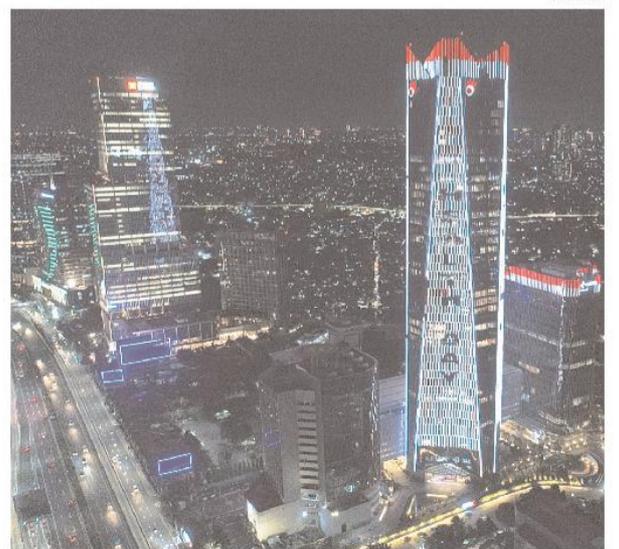
berbagai pencegahan, baik di internal maupun eksternal perusahaan.

Dia menyampaikan, Pelindo III sudah menerapkan *physical distancing* di area pelabuhan dan perkantoran. Selain itu, Pelindo III juga menyediakan bilik steril dan *hand sanitizer* di lingkungan kerja dan terminal penumpang.

"Kami juga melakukan pengecekan suhu tubuh hingga pemberian vaksin influenza dan minuman herbal gratis untuk meningkatkan daya tahan tubuh para pegawai," ujar Doso.

Sebelumnya, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan insentif untuk jasa bongkar muat di sejumlah pelabuhan. Putut menuturkan, salah satunya insentif tarif jasa bongkar muat akan dilakukan di Pelabuhan Benoa, Bali.

Dia menjelaskan, hal tersebut dilakukan juga untuk mendorong peningkatan ekonomi melalui pariwisata seperti Bali dengan memberikan sejumlah insentif dan kelonggaran alur logistik. ■ antara ed: citra listya rini



APRESIASI TELKOM Tulisan World Health Day terlihat di Gedung PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, Selasa (7/4) malam. Animasi lampu yang berisikan ucapan "Terima Kasih Tenaga Medis Indonesia" dan "World Health Day" ditampilkan Telkom sebagai apresiasi terhadap para tenaga medis yang menangani pandemi Covid-19.

DOK TELKOM

Subsidi Butuh Akurasi Data

Perubahan skema penyaluran subsidi dirancang untuk jangka panjang.

ADINDA PRYANKA, MUHAMMAD NURSAYMSI

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengkaji perubahan skema penyaluran subsidi energi langsung kepada masyarakat penerima bantuan. Dengan mekanisme baru, subsidi tidak lagi disalurkan melalui perusahaan pelat merah atau BUMN.

Direktur Jenderal Perencanaan Kemkeu Andin Hadiyanto menilai, desain subsidi yang optimal memang langsung diberikan kepada penerima atau masyarakat membutuhkan. Hanya saja, tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah akurasi data. "Basis datanya harus lebih baik dan lengkap," ujar Andin dalam telekonferensi bersama wartawan di Jakarta, Rabu (8/4).

Meski tidak mudah melakukan reformasi subsidi, Andin menuturkan, perubahan skema subsidi energi akan membuat kebijakan subsidi ke depan sem-

kin efisien. Dia menyampaikan, orang-orang yang mendapatkan subsidi adalah mereka yang memang berhak. Dampak berikutnya, anggaran belanja pemerintah dapat lebih hemat dan bisa dialokasikan untuk kepentingan lain yang juga berdampak besar kepada masyarakat membutuhkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani menuturkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian BUMN maupun pihak terkait lainnya mengenai skema subsidi baru ke depan. Saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam. Menurut Askolani, perubahan skema ini tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka panjang.

"Sehingga, harus kami yakini, kami tidak boleh terburu-buru. Harus betul-betul solid dan komprehensif untuk melakukan perubahan," ujar Askolani dalam kesempatan yang sama.

Askolani menjelaskan, pemerintah akan segera membahas



TARIF LISTRIK Pekerja beraktivitas di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (Gilet) transmisi Jawa bagian timur dan Bali di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/4). PT PLN [persero] memastikan tarif listrik rumah tangga nonsubsidi golongan 900 VA dan 1.300 VA ke atas tidak naik.

rencana perubahan skema subsidi energi dalam sidang kabinet. Dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa membuat keputusan segera dan dituangkan dalam dokumen pemerintahan.

Askolani menambahkan, pemerintah memiliki mekanisme tersendiri untuk mengkaji rencana perubahan skema subsidi yang tidak disebutkan secara

terperinci. Namun, ia menyebutkan, salah satu faktor yang menjadi dasar kajian adalah kejadian dalam penanganan pandemi virus korona baru atau Covid-19 saat ini.

Menurut Askolani, penanganan Covid-19 yang sekarang dilakukan bisa menjadi bahan pembelajaran secara komprehensif untuk merancang kebijakan ke depannya. "Ini bisa

menjadi pijakan untuk reformasi pada tahun-tahun ke depan. Tidak hanya subsidi, juga kebijakan di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan perlindungan UMKM," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung implementasi penyaluran subsidi energi langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pemerintah akan menerapkan kebijakan subsidi energi yang baru ke depan. Erick mengatakan, subsidi listrik, BBM, dan LPG nantinya akan langsung disalurkan kepada masyarakat dan tidak lagi melalui BUMN. Dia mengakui, keputusan ini diambil sesuai rapat antara dirinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membahas kebijakan energi ke depan. Erick menyampaikannya, kebijakan ini akan diumumkan oleh Menkeu pada pertengahan tahun ini atau paling lambat awal 2021.

"Kita sudah rapat dengan Menkeu dan Menteri ESDM mengenai kebijakan energi ke depan dan prioritas dari subsidi. Kebijakan ke depan kita ingin perusahaan BUMN tidak terima

subsidi. Subsidi ini biar langsung ke rakyat," ujar Erick, pekan lalu.

Erick menyebut, kebijakan ini mendorong BUMN untuk lebih fokus dalam peningkatan kinerja perusahaan. Erick juga berharap kebijakan subsidi langsung ke rakyat mampu mencegah upaya window dressing di bursa saham. "Ini bagian dari transparansi supaya perusahaan BUMN benar-benar menjadi korporasi yang memikirkan korporasi dan bagian mengubah paradigma pimpinan direksi BUMN," ucap Erick.

Tak hanya subsidi pada sektor BUMN energi, Erick juga tengah mengkaji kebijakan serupa untuk sektor pertanian. Erick mengaku akan melakukan pembahasan dalam satu-dua pekan ke depan terkait penyaluran subsidi pupuk. Seperti subsidi energi, nantinya subsidi pupuk tak lagi disalurkan lewat BUMN, tapi langsung ke rakyat.

"Terus terang, yang akan kita pelajari pupuk. Kementerian BUMN sekarang akan belajar pupuk, kita akan ada rapat khusus mengenai pupuk supaya kita bisa pastikan. Kita juga ada koordinasi dengan kementerian lain," kata Erick. ■ ed: ahmad fikri noor

bank net syariah logo and branding.

PT Bank Net Indonesia Syariah (d/h PT Bank Maybank Syariah Indonesia)

KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445
website : www.banknetsyariah.co.id

LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 (Diaudit)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENYISIRAN KOMPRESIF LAIN TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINGENSI TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (PPM) TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN DISTRIBUSI RAS RASIA TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN PERHITUNGAN KEMERUKAAN TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN TRANSAKSI SPOT AND FORWARD TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

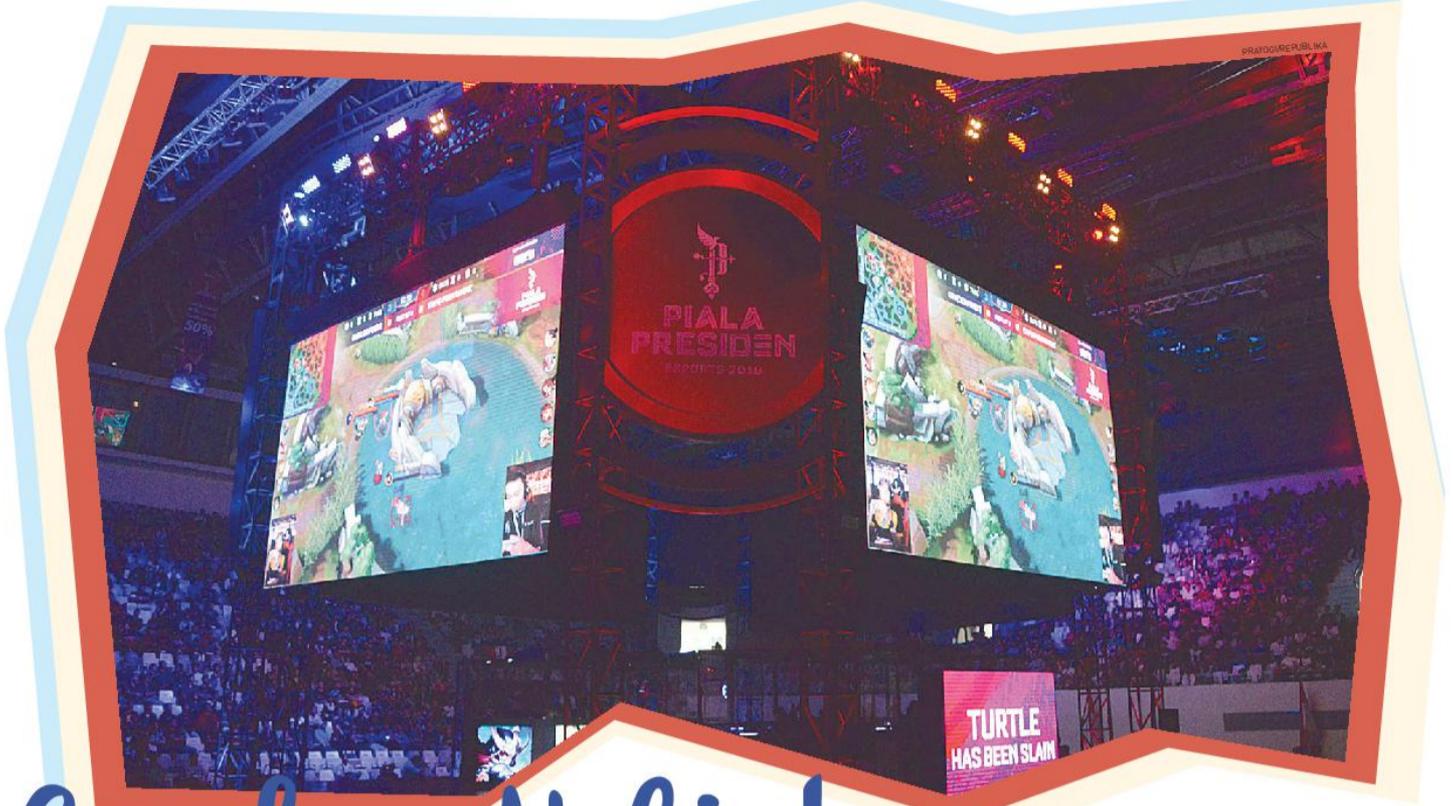
LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN PERHITUNGAN KEMERUKAAN TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN TRANSAKSI SPOT AND FORWARD TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.

LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIMULIHAN 31 Desember 2019 dan 2018. Table with columns for No., POS - POS, and financial values for 2019 and 2018.



Puaskan Hobi dan Tekan Penularan



melakukan berbagai hal sendiri. "Pemain gim tahu bagaimana bersatu, bahkan ketika kita terpisah. Jadi, mari kita (jaga) keamanan selama ini dan lakukan bagian kita sebagai industri untuk meratakan kurva," ujar Wyatt.

Di tingkat lokal

Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI), Clevio Coder Camp, dan Garena juga melirik gim daring sebagai salah satu upaya menekan penyebaran Covid-19.

Ajang cipta gim "Ayo Bikin Game di Rumah Aja" pun digelar. Mengusung tema "Mari Bersama Melawan Covid-19: Hidup Bersih, Sehat dan Seru, kegiatan ini bertujuan meminimalisasi penular virus korona melalui media interaktif.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Ke-

siswa SD, SMP, SMA/SMK) dan mahasiswa/umum. Masing-masing peserta diharuskan membentuk tim dan bekerja sama dengan empat hari untuk menghasilkan sebuah purwarupa gim yang bisa dimainkan.

Menurut Wakil Ketua AGI Adam Ardisamita, semua aktivitas dan komunikasi selama ajang ini dilakukan secara daring, tanpa harus keluar rumah. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam menentukan gim favorit mereka dengan cara *voting* terhadap karya-karya yang didaftarkan.

Adam menambahkan, hasil gim akan dapat membantu sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui acara ini, AGI dan *developer game* Indonesia ingin berkontribusi membantu menjaga Indonesia dengan membuat gim untuk mendukung masyarakat terkait pandemi korona, kata Adam.

Tak hanya menyasar para



menterian Kominfo Republik Indonesia Samuel Abrijani Pangraban berharap gim video hasil dari ajang cipta gim ini bisa menjadi komponen dari media konvensional untuk menyosialisasikan cara pencegahan penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan lomba dilakukan dari rumah sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Kondisi perang melawan Covid-19 yang kita alami saat ini membuat masyarakat diimbau beraktivitas di rumah saja, menjaga jarak dengan orang lain agar kita segera dapat menahani laju penyebaran yang terinfeksi virus korona, kata Samuel melalui siaran pers.

Menurut dia, ajang kompetisi juga ditargetkan untuk membentuk komunitas pencipta gim di Indonesia. "Ajang cipta gim ini mengajak generasi muda untuk bersama membuat gim di rumah masing-masing sehingga waktu yang dimiliki menjadi terisi dengan penambahan karya dan pengetahuan," ujar Samuel.

Ayo Bikin Game di Rumah Aja terbagi dalam beberapa kategori, yakni junior (untuk

pengembang,

ajang ini juga membuka kesempatan bagi para pemula. CEO Clevio Coder Camp Fransiska Oetami menyatakan, pihaknya telah menyiapkan *coach* yang akan mengajarkan *coding game* melalui *webinar* gratis. Dengan demikian, calon peserta yang belum bisa membuat gim akan dapat belajar dengan sarana ini.

Jangan khawatir kalau belum pernah *coding* atau *bikin game* sebelumnya. Meskipun harus *#dirumahaja*, tidak berarti harus sendirisendiri karena anak juga akan belajar mengembangkan *social skill*-nya dengan kerja bersama teman secara online, persis seperti Bapak Ibu yang *meeting online* karena *work from home*, kata Fransiska.

Pendaftaran ajang cipta gim "Ayo Bikin Game di Rumah Aja" telah dibuka pada 29 Maret. *Voting* akan ditutup pada 10 April pukul 10.00 WIB. Penjurian final akan dilakukan pada 11 April dan pemenang diumumkan pada 13 April 2020.

■ ed: setyanavidita livikacansera

■ NOER QOMARIAH KUSUMAWARDHANI

Berada dalam masa karantina tak menghalangi banyak orang untuk tetap aktif bekerja dan merasa bahagia. Bermain gim daring menjadi salah satu cara agar diri tetap terhibur.

Beberapa bulan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti maraknya perkembangan industri gim daring sebagai ancaman bagi kesehatan mental penggunaannya. Namun, kini pada masa pandemi, pendapat WHO terhadap gim daring berubah arah.

Duta Besar WHO untuk Strategi Global Ray Chambers mengungkapkan, industri gim dapat menjangkau jutaan orang dengan pesan-pesan penting untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19. Menurut dia, perusahaan gim akan mendorong pemain untuk menjaga jarak dari yang lain serta mempraktikkan kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan.

Ia juga mencicit unggahan dari kampanye #PlayApartTogether pada 28 Maret lalu sebagai dukungan nyata bagi masyarakat untuk bermain gim untuk memutus penyebaran Covid-19.

Kami berada pada momen penting dalam menentukan hasil pandemi ini. Perusahaan industri gim memiliki pemirsa global. Kami mendorong semua untuk #PlayApartTogether. Makin jauh jarak fisik dan tindakan lain akan membantu meratakan kurva dan menyelamatkan nyawa, kata Chambers melalui *Twitter*.

Di unggahannya, Chambers juga menyertakan tautan dari *Businesswire* terkait kampanye Play Apart Together. Seperti yang dicatat *USA Today*, permainan video tak hanya menjadi pengalih perhatian selama pandemi saat ini.

Banyak permainan di pasar, seperti Nintendo Switch, yang juga memungkinkan pemain terhubung. Global Head of Gaming Youtube Ryan Wyatt menjelaskan, selama 15 tahun, *Youtube* telah menjadi komunitas tempat orang

Industri gim dapat menjangkau banyak orang dan efektif mencegah penularan Covid-19.

KAMPANYE BERMAIN DIRUMAH

Meski saat ini para pencinta gim tak bisa lagi bermain dalam ajang turnamen secara langsung, industri *e-sport* di Indonesia tetap bergairah. Senada dengan segala aktivitas bekerja, belajar, hingga *webinar*, kini ajang turnamen *e-sports* pun dialihkan secara daring.

Business Development Esports Manager Garena Indonesia Wijaya Nugroho mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan bagi semuanya. Garena Indonesia pun sangat mendukung pemerintah dan WHO untuk memanfaatkan gim daring sebagai sarana penyampaian pesan-pesan untuk menjaga kesehatan.

"Terlebih, ada rekomendasi juga oleh WHO untuk salah satunya main *game* sebagai alternatif dalam melengkapi kesibukan saat *stay at home* dan *physical distancing* ini," kata Wijaya.

Oleh karena itu, dari masing-masing gim sendiri, Garena telah menyiapkan program atau kampanye untuk tetap berada di rumah. Contohnya, *maabardirumah*, *playfromhome*, dan *stayhomewithus*.

Demi kebaikan, lanjut dia, semua turnamen dan acara kini dialihkan secara daring dan pemain gim tetap bisa main *bareng* (mabar). Garena pun telah menyiapkan wadah untuk memfasilitasi berbagai kegiatan dari rumah tersebut. "Sudah mulai event nasional kami final FFIM 2020 Spring sampai turnamen-turamen kasual, mulai dari amatir-semipro, semuanya kini dilaksanakan secara *online*," ujarnya. ■ ed: setyanavidita livikacansera

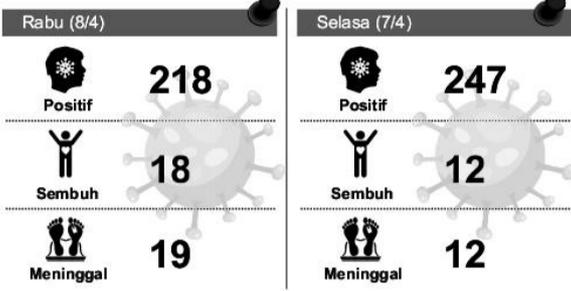
SUARAKAN MELALUI KAMPANYE GLOBAL

Pemanfaatan gim daring sebagai upaya menekan pandemi yang terjadi saat ini mendorong lahirnya kampanye besar. Sebagai bagian dari kampanye yang dijuluki #PlayApartTogether, 18 perusahaan gim video, termasuk raksasa *live streaming*, Twitch, dan Activision Blizzard bersatu mendorong para pemain menggunakan gim video. Ini adalah cara untuk menjaga jarak fisik sambil tetap terhubung secara sosial dengan yang lain.

CEO Activision Blizzard Bobby Kotick mengungkapkan, selama ini tidak pernah lebih penting untuk memastikan orang tetap terhubung satu sama lain. Gim daring pun dapat menjadi platform yang sempurna karena menghubungkan orang melalui kegembiraan, tujuan, dan makna.

Kami bangga berpartisipasi dalam inisiatif yang berharga dan diperlukan ini, ujar Kotick yang dilansir dari *Business Insider*. ■ ed: setyanavidita livikacansera

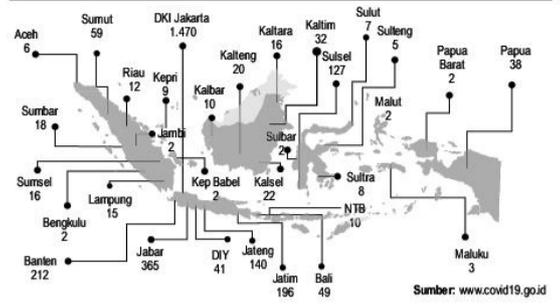
PERTAMBAHAN JUMLAH PASIEN COVID-19



JUMLAH NASIONAL



SEBARAN POSITIF COVID-19 (KASUS)



THOUDY BADA/REPUBLIKA

BANTUAN SEMBAKO

Istri Menteri Sosial Julianti Batubara, Grace Batubara (kedua dari kanan) memantau dapur umum di Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Rabu (8/4). Kementerian sosial membagikan makanan dan sembako sebanyak 200 ribu kotak untuk membantu warga terdampak Covid-19 di Jakarta.

RI Terima Bantuan Negara Sahabat

■ DESSY SUCIATI SAPUTRI

JAKARTA — Pemerintah Selandia Baru memberikan bantuan senilai 150 ribu dolar New Zealand (NZD) atau setara dengan Rp 1,5 miliar kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman untuk penanggulangan wabah Covid-19. Bantuan ini diberikan Pemerintah Selandia Baru agar Indonesia dapat meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam melakukan tes Covid-19.

"Kontribusi kami akan membantu Lembaga Eijkman terus memproduksi dan mendistribusikan 100 ribu VTM (*viral transport medium*) dan menyediakan persediaan untuk analisis *polymerase chain reaction* (PCR) yang akurat dan terpercaya dalam mendeteksi kasus Covid-19 di Indonesia," kata Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Jonathan Austin dalam siaran resmi, Rabu (8/4).

Seperti diketahui, Lembaga Eijkman merupakan salah satu laboratorium rujukan tes Covid-19 sejak 13 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah sampel Covid-19 yang dirujuk ke lembaga ini pun meningkat drastis. Bahkan, dalam hitungan hari, Lembaga Eijkman telah memproduksi dan mendistribusikan 20 ribu VTM ke 95 layanan kesehatan di seluruh Indonesia. VTM sendiri merupakan media penting untuk melakukan transportasi sampel lendir dari pasien yang diduga terkena Covid-19 dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.

Sayangnya, persediaan VTM ini semakin menipis saat ini dan bahkan hampir tidak ada sehingga sulit untuk memperbanyak jumlah tes Covid-19. "Terus melakukan diagnosis yang akurat dan terpercaya untuk kasus Covid-19 dengan memproduksi VTM, *swab nasofaring* dan *orofaring* (*nasopharyngeal* dan *oropharyngeal flocked swabs*) dan kit untuk ekstraksi RNA (*RNA extraction kits*) adalah sesuatu yang sangat serius di Indonesia," kata Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Soebandrio.

Di lain pihak, bantuan kemanusiaan untuk RI juga datang dari Korea Selatan. Bantuan berupa 300 unit *sprayer* dari Negeri Ginseng diserahkan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Beom, yang diterima secara simbolis oleh Harmensyah, sekretaris umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga koordinator Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Atas nama Pemerintah Indonesia dan gugus tugas serta seluruh masyarakat Indonesia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja sama yang baik antara Indonesia dan Korea Selatan. Semoga bantuan ini bermanfaat dalam usaha kami memerangi Covid-19. Dan, akan segera kami distribusikan pada masyarakat yang membutuhkan," kata Harmensyah di gedung BNPB, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Harmensyah menyebut, Pemerintah RI masih membuka peluang untuk menerima bantuan berupa alat pelindung diri (APD) hingga ventilator untuk ke depannya. "Bantuan ini juga sangat membantu Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 ini," ujar dia.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang Beom mengatakan, Pemerintah Korsel sangat senang memberi bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Indonesia sebagai simbol keimanan strategis. "Meski saat ini diserahkan 300 unit untuk membantu Pemerintah Indonesia memerangi Covid-19, ini datang dari niatan kami terdalam yang kami yakini manfaatnya lebih dari itu," ujarnya.

■ antara ed: agus raharjo

Bangun Solidaritas

Pemerintah pusat dan daerah diminta bersinergi jamin kehidupan warga.

● RR LAENY SULISTYAWATI
MIMI KARTIKA

JAKARTA — Seluruh masyarakat diajak bersatu membangun solidaritas untuk melawan pandemi Covid-19 yang terus menyebar. Hingga Rabu (8/4), jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 2.956 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 240 jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 adalah perang seluruh masyarakat melawan wabah korona jenis baru dari Wuhan, Cina. Ia meminta seluruh masyarakat bersatu dan bergotong royong, saling membantu untuk memutus penyebaran, serta mengatasi dampak yang terjadi akibat pandemi ini.

"Kita semua harus bersatu melawan Covid-19. Pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat harus solid agar kita dapat sukses berperang melawan Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4).

Ketua Pengarah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ini menjelaskan, langkah percepatan penanganan terus dilakukan, di antaranya dengan mengelompokkan anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan. Termasuk memberikan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19. Peme-

rintah juga akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait beberapa isu guna mempercepat penanganan Covid-19. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga meminta semua pihak bersinergi dalam perang melawan virus korona. "Sudah banyak *war* atau perang covid. Ini adalah perang pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, virus. Dan, tidak mengenal apa targetnya, mau kaya mau miskin, pejabat mau bawahan, laki maupun perempuan, polisi, tentara, siapa pun dapat terserang," ujar Tito, Rabu.

Ia mengatakan, selain kesehatan, pandemi virus korona juga berdampak pada sektor ekonomi. Menurut dia, pemerintah perlu strategi yang tepat dan terukur agar kesehatan publik tetap diutamakan, tetapi roda perekonomian harus tetap bergerak. Tito telah menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan realokasi dana dan *re-focussing* anggaran ini berfokus pada tiga hal.

Pertama, untuk meningkatkan kapasitas kesehatan. Kedua, menyiapkan jaringan pengamanan sosial. Sebab, banyak masyarakat terdampak akibat upaya pencegahan penyebaran virus korona dengan menjaga jarak fisik dan berdiam diri di rumah. Menurut Tito, banyak masyarakat terpukul, terutama yang kurang

Bansos PKH per Bulan

- Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun: Rp 250 ribu
- Siswa SD: Rp 75 ribu
- Siswa SMP: Rp 125 ribu
- Siswa SMA: Rp 166 ribu
- Penyandang disabilitas berat: Rp 200 ribu
- Lanjut usia: Rp 200 ribu

Sumber: Kemensos

mampu.

Seandainya mereka tidak ditangani dan tidak dibantu, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi. "Dan, krisis ekonomi ini akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan, gangguan keamanan," kata dia. Ketiga, membantu dunia usaha tetap hidup dan berjalan.

Jaring pengaman

Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) akan merutinkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi setiap bulan sebagai antisipasi dampak Covid-19. Sebelumnya, PKH disalurkan empat kali dalam setahun terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

"Mulai pertengahan April ini, KPM sudah bisa cairkan bansos PKH setiap bulan hingga Desember 2020. Sebelumnya, bansos PKH diberikan tiap tiga bulan sekali, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan

Oktober," ujar Menteri Sosial, Julianti P Batubara.

Mensos mengatakan, penerima PKH dapat memanfaatkan pemasukan uang bulanan tersebut di tengah kesulitan ekonomi dan kewajiban tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah. Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan jaringan pengamanan sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia. Itu dilakukan agar daya beli mereka dapat terjaga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah juga menaikkan anggaran bansos PKH sebesar 25 persen.

Pemerintah juga menaikkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta KPM. Penambahan ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin) dan bersumber dari data yang dimutakhirkan setiap pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

"Jadi, bansos dapat disalurkan lebih tepat sasaran karena yang mengetahui kondisi warga adalah masing-masing pemda," kata Julianti. Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina meminta Kemensos memastikan keterlibatan pemerintah daerah (pemda) dalam menjalankan kebijakan Jaringan Pengamanan Sosial agar tepat sasaran. Selain itu, proses pencairan di lapangan juga harus berjalan lancar dan dalam prinsip *physical distancing*.

"Saatnya pusat dan daerah gerak *barang* dalam satu tarikan napas. Biar masyarakat ada rasa nyaman," ujarnya. ■ rongo astungkoro/febrianto adi saputro ed: agus raharjo

Berpikir Positif dan Hidup Bersih Resep Sembuh

■ FEBRIAN FACHRI

Hingga Rabu (8/4), jumlah pasien positif Covid-19 yang sembuh mencapai 222 orang. Meskipun jumlah ini lebih sedikit dibandingkan jumlah kematian akibat virus yang berasal dari Wuhan, Cina, tetapi kemungkinan sembuh bagi pasien positif tetap ada. Seorang pasien positif Covid-19 asal Tanah Datar, Sumatera Barat, yang sudah berhasil sembuh menyampaikan sejumlah pesan kepada pasien positif yang masih berjuang melawan Covid-19.

Ira, nama pasien sembuh tersebut, berharap lebih banyak pasien positif lainnya segera menyusul untuk sembuh dari wabah korona jenis baru ini. Ia mengaku, hal pertama yang perlu dilakukan pasien positif Covid-19 setelah dinyatakan terpapar korona adalah memperkuat imunitas tubuh. Hal itu bisa dilakukan dengan memperbanyak konsumsi vitamin C.

Selain itu, yang tak kalah penting, menurut Ira, ialah menjaga pikiran agar tetap positif supaya tidak dirundung kepanikan. "Pesan saya kita harus punya kemauan dan komitmen untuk membantu diri sendiri hadapi Covid-19, berpikir positif dan berperilaku hidup bersih dan sehat," kata Ira, Rabu (8/4).

Ira berterima kasih atas dukungan berbagai pihak terhadap dirinya dan pasien lainnya agar dapat sembuh dari korona. Ira berharap keberhasilannya terbebas dari paparan Covid-19 menjadi motivasi dan optimisme bagi pasien positif lainnya. "Semoga jadi motivasi bagi masyarakat lainnya bahwa Covid-19 bisa sembuh," ujarnya.

Ira dinyatakan sembuh dari Covid-19 sejak Senin (6/4). Kepastian itu didapatnya setelah dua kali pengujian swab di Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand menunjukkan hasil negatif. Hari itu juga Ira diperbolehkan pulang setelah sebelumnya sejak 20 Maret diisolasi di Rumah Sakit Achmd Muchtar

Bukittinggi.

Terpisah, pasien positif Covid-19 lain yang dinyatakan sembuh dari Kabupaten Kediri, Bambang Triono Putro, juga membagikan resepnya agar masyarakat tidak panik ketika dinyatakan positif terpapar Covid-19. Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri itu menuturkan, hal pertama yang harus disiapkan bagi mereka yang dinyatakan positif Covid-19 adalah menyiapkan mental. Selain itu, seorang yang dinyatakan terpapar Covid-19 harus selalu menjaga asupan gizi pada makanannya.

Ia mengaku, selama dalam perawatan di RSUD SLG Kabupaten Kediri, berusaha memperhatikan asupan gizi, membiasakan untuk disiplin, dan menjaga mental. "Saya berusaha menjaga mental saya, terutama soal berita yang saya anggap negatif terkait Covid-19, seperti kematian, penyebaran, dan lainnya. Saya juga selalu mendapat dukungan dan

"
Saya berusaha menjaga mental saya, terutama soal berita yang saya anggap negatif terkait Covid-19, seperti kematian dan penyebaran.

komunikasi dari keluarga dan orang tersayang," tuturnya di Kediri, Rabu.

Bambang menyebut, dukungan dan semangat untuk sembuh dari keluarga, teman, untuk melawan virus tersebut, juga sangat dibutuhkan. Selain itu, berbagai makanan bergizi dan vitamin

juga dibutuhkan. "Untuk asupan makanan dan vitamin, semua telah dicukupi oleh rumah sakit," kata dr Bambang yang saat ini sedang proses pemulihan di rumah.

Ia mengaku, mulai merasa tidak enak badan sejak Selasa (24/3) dengan gejala sakit batuk dan sesak, yang mirip dengan gejala Covid-19. Untuk itu, ia mengisolasi diri di dalam rumah. Namun, karena batuk dan sesak napas yang dirasakannya semakin parah, ia meminta untuk diisolasi di RSUD SLG Kabupaten Kediri pada Jumat (27/3).

"Kebetulan saya seorang tenaga medis dan saya mengerti bagaimana cara menjaga diri saya dan keluarga dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan asupan gizi," kata dia. Ia berharap seluruh masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah dan tetap menjaga kesehatan dengan rutin mencuci tangan dan menggunakan masker.

■ antara ed: agus raharjo

MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Paradigma "Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi"



APBN 2020 (Rp Triliun)	Skenario Awal	Skenario Pasca Perppu 1/2020	Respon Kebijakan Pemerintah	Anggaran (Rp Triliun)
Pendapatan Negara	2.233,2	1.760,9	Memperkuat Perekonomian Domestik	10,3
Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.462,6	Stimulus Fiskal Ke-1	10,3
Tax Ratio	10,69%	8,69%	Menjaga Daya Beli dan Kemudahan Ekspor-Impor	22,9
PNBP	367,0	297,8	Pelebaran Defisit Anggaran	125,0
Belanja Negara	2.540,4	2.613,8	Stimulus Fiskal Ke-2	147,9
Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5	1.851,1	Intervensi Kesehatan	75,0
Transfer Ke Daerah	856,9	762,7	Belanja Kesehatan Covid-19	65,8
			Jaring Pengaman Sosial	110,0
			Perluasan Jaring Pengaman Sosial	65,0
			Cadangan Kebutuhan Pokok	25,0
			Anggaran Pendidikan untuk Covid-19	20,0
			Dukungan Dunia Usaha	70,1
			Diskon Pajak dan Bea Masuk	64,0
			Stimulus KUR	6,1
			Dukungan Dunia Usaha	150,0
			Perogram Pemulihan Ekonomi Nasional	150,0
			Stimulus Fiskal Ke-3	405,1
Keseimbangan Primer	-12,0	-517,8		
Defisit Anggaran	-307,2	-852,9		
% Defisit thd PDB	-1,76%	-5,07%		
Pembiayaan Utang	351,9	1.006,4		
Pembiayaan Investasi	-74,2	-229,3		

Sumber: Diolah dari Perpres No. 54/2020 dan Kemenkeu

MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Paradigma "Penanggulangan Bencana"



APBN 2020 (Rp Triliun)	Skenario Alternatif	Respon Kebijakan Menanggulangi Bencana Kesehatan	Anggaran (Rp Triliun)
Pendapatan Negara	1.851,3	Mitigasi Pandemi (termasuk kampanye publik)	5
Penerimaan Perpajakan	1.553,0	Intervensi Kesehatan	120
Tax Ratio	9,23%	Insentif dan Santunan Tenaga Medis	15
PNBP	297,8	Belanja Perawatan Kesehatan	60
Belanja Negara	2.436,7	Facilitas Kesehatan dan Karantina	40
Belanja Pemerintah Pusat	1.379,0	Riset Menghadapi Covid-19	5
Transfer Ke Daerah	762,7	Dukungan Pembatasan Sosial Berskala Besar	70
Stimulus "Penanggulangan Bencana"	295,0	Insentif Peliburan Tempat Kerja	25
Keseimbangan Primer	-250,3	Insentif Pembatasan Kegiatan Usaha	15
Defisit Anggaran	-585,5	Perlindungan Usaha Mikro dan Kecil	30
% Defisit thd PDB	-3,48%	Dukungan Karantina Wilayah	100
Pembiayaan Utang	679,3	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Warga	75
Pembiayaan Investasi	79,3	Operasi Pasar / Logistik	25
			295

Sumber: Simulasi Staf IDEAS

Menanggulangi PANDEMI



Yusuf Wibisono
Direktur IDEAS



Fajri Azhari
Peneliti IDEAS



Askar Muhammad
Peneliti IDEAS



Siti Nur Rosifah
Peneliti IDEAS

Indonesia kini memasuki fase kritis dalam menghadapi pandemi covid-19, sejak pertama kali secara resmi mengumumkan kasus infeksi covid-19 pada 2 Maret 2020. Kini, per 7 April 2020 atau hari ke-37, terdapat 2.738 kasus positif terinfeksi covid-19 di Indonesia dengan 221 orang meninggal dunia. Dengan ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian dari kasus infeksi (*case fatality rate*/CFR) tertinggi di dunia, yaitu 8,1 persen. Negara lain dengan jumlah kasus setara Indonesia, memiliki CFR jauh lebih rendah.

CFR Indonesia yang kini 8,1 persen menunjukkan 2 kemungkinan yang keduanya merupakan situasi darurat: sistem kesehatan nasional telah mencapai batas kapasitasnya, atau ketidaksiapan pemerintah menghadapi dan mendeteksi penyebaran wabah covid-19. Jika CFR di kisaran "normal", dengan asumsi konservatif 3,5 persen, kasus covid-19 yang sesungguhnya kini telah mencapai kisaran 6.314 kasus. Lebih jauh, jika tingkat kematian PDP dan ODP ini ikut diperhitungkan dengan asumsi jumlah kematian PDP dan ODP 2,5 kali lipat dari pasien positif, maka kasus covid-19 di Indonesia kini telah mencapai 15.786 kasus!

Waktu kritis menahan ledakan

Per 7 April 2020, sebaran kasus positif covid-19 di Indonesia telah meluas hingga 32 provinsi. Dengan kini penyebaran covid-19 nyaris telah menjangkau seluruh negeri, Indonesia kini memasuki masa kritis untuk menahan ledakan infeksi. Terkini, meski telah menetapkan status darurat kesehatan berdasarkan Keppres No. 11/2020, namun pemerintah hanya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP No. 21/2020. Restriksi moderat namun diimplementasikan secara terbatas dan lambat, berdasarkan inisiatif pemerintah daerah, kami memproyeksikan ke depan jumlah kasus infeksi covid-19 Indonesia masih akan terus meningkat, menembus 10 ribu kasus pada hari ke-51, menjelang bulan Ramadhan 24 April 2020, dan menembus 100 ribu kasus pada hari ke-73.

Urgensi kebijakan yang lebih tegas dari PSBB adalah mendesak, yaitu datangnya Bulan Ramadhan (24 April 2020) dan Hari Raya Idul Fitri (25 Mei 2020). Budaya silaturahmi dan ziarah kubur jelang Ramadhan, tradisi buka puasa bersama dan Sholat Tarawih berjamaah di sepanjang Ramadhan, serta ritual mudik tahunan jelang Idul Fitri, adalah tantangan besar untuk menahan ledakan covid-19 di negeri muslim terbesar di dunia ini.

Dalam situasi normal, kami mengestimasi jumlah pemudik dari Jabodetabek berada di kisaran 10 juta orang. Jalur utama dari pergerakan puluhan juta

pemudik Jabodetabek ini adalah menuju Jawa Tengah (4,7 juta), Jawa Barat (2,8 juta), dan Jawa Timur (1,3 juta). Tanpa kesadaran dan restriksi yang ketat, potensi penyebaran covid-19 dari episentrum wabah ke penjuru Jawa adalah kencananya. Jika potensi ledakan wabah dari tradisi di bulan suci ini tidak dicegah secara optimal, kita terancam memasuki Idul Fitri dengan lonjakan kasus menembus 300 ribu kasus.

Penetapan status darurat kesehatan masyarakat melalui Keppres No. 11/2020 dan penerapan PSBB sebagaimana PP No. 21/2020 patut diapresiasi, namun sayangnya tidak lagi memadai. Dengan kecepatan dan cakupan penyebaran covid-19 saat ini, pemerintah harus secepatnya menetapkan Karantina Wilayah secara total di daerah episentrum wabah terutama Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan kota-kota besar lainnya, serta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara serentak di wilayah lainnya, terutama Jawa. Hanya tindakan tindakan tegas dalam waktu dekat yang akan mencegah ledakan kasus infeksi covid-19 secara signifikan (*flattening the curve*).

Covid-19 dan perekonomian

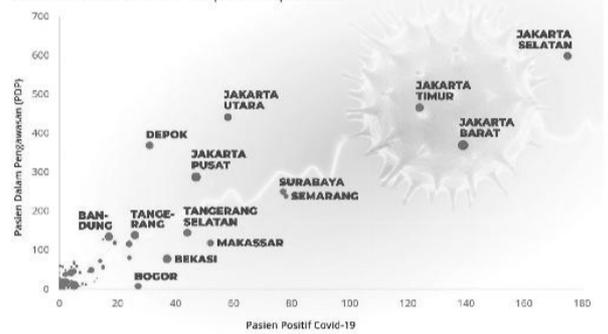
Covid-19 meski memiliki *case-fatality rate* (CFR) yang rendah, namun sangat menular. Dengan besarnya populasi yang terinfeksi secara eksponensial dalam waktu singkat, sistem kesehatan dipastikan akan tumbang sehingga CFR akan meningkat. Korban jiwa bisa menjadi sangat besar. Tak terkontrolnya pandemi akan dibayar sangat mahal, tidak hanya krisis kemanusiaan, namun juga sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, perekonomian tidak hanya akan kehilangan tenaga kerja produktif, namun juga tenaga medis yang sangat sulit diukur. Dalam situasi pandemi maka respon kebijakan harus cepat dan tegas, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Dengan menyelamatkan manusia, kita akan menyelamatkan semua aspek kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi.

Prospek ekonomi maka akan ditentukan oleh respon kebijakan menghadapi pandemi. Ketika respon kebijakan tidak cepat dan tegas, hal ini akan dibayar pelaku pasar sebagai ketidakmampuan pemerintah mengatasi pandemi. Pelaku pasar mulai menunjukkan ketidakpercayaan pada pemerintah sejak Februari 2020 ketika kukuh mengklaim Indonesia bebas covid-19. Sejak awal Maret 2020, ketika akhirnya pemerintah mengakui paparan covid-19 telah masuk ke Indonesia, tekanan pasar menguarat seiring membesarnya kasus covid-19. Nilai tukar Rupiah melemah tajam dan indeks harga saham gabungan anjlok drastis hanya dalam hitungan pekan.

Dengan keterbatasan sistem kesehatan, satu-satunya cara mengatasi covid-19 da-

KOTA JAWA MEMBARA

Zona Merah Covid-19 per 5 April 2020



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

lam jangka pendek adalah menurunkan tingkat penularan, dengan cara menurunkan interaksi dan mobilitas sosial. Dengan demikian, menurunnya kinerja ekonomi dalam pandemi adalah tidak terhindarkan. Fokus kebijakan adalah mengatasi pandemi secepatnya, agar perekonomian dapat dipulihkan segera. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian. Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek adalah pil pahit yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi.

Respon kebijakan jangka pendek yang sangat mendesak dilakukan adalah melokalisasi covid-19 di episentrum wabah. Lebih dari setengah kasus covid-19 yang terdeteksi terkonsentrasi di Jakarta dan sekitarnya. Kota-kota besar Jawa lainnya juga menjadi zona merah pandemi. Eskalasi pandemi akan membesar dan menjadi tak terkendali di Jawa jika respon kebijakan masih berfokus pada ekonomi. Stimulus fiskal secara jelas meningkatkan aktivitas ekonomi, sedangkan penanggulangan pandemi mengharuskan penurunan interaksi sosial. Maka, dalam situasi pandemi, mempromosikan ekonomi sama dengan membunuh nyawa lebih banyak.

Sebagai pusat ekonomi nasional, pengendalian Jabodetabek dipastikan akan menurunkan perekonomian nasional secara signifikan. Namun penyelamatan nyawa sebanyak mungkin adalah prioritas kebijakan tertinggi yang tidak dapat ditawar. Dengan sistem kesehatan semakin menuju batas kapasitasnya, maka menurunkan interaksi sosial secara drastis di episentrum wabah secepatnya menjadi keharusan.

Menanggulangi bencana

Respon pemerintah sejak awal terhadap penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19) adalah pendekatan "stabilitas dan pemulihan ekonomi". Indonesia yang pada Januari 2020 masih belum memperhitungkan wabah ini, akhirnya mulai merespon pada Februari 2020, namun bukan mitigasi kesehatan melainkan stimulus ekonomi. Program penguatan perekonomian domestik senilai Rp 10,3 triliun diluncurkan pada 25 Februari, termasuk insentif sektor pariwisata. Pasca Indonesia secara resmi terpapar covid-19 pada 2 Maret, pemerintah kembali menambah stimulus ekonomi yang diluncurkan pada 13 Maret senilai Rp 22,9 triliun dan pelebaran defisit anggaran hingga Rp 125 triliun dengan fokus pada menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor.

Setelah covid-19 menyebar cepat ke penjuru negeri dan kapasitas sistem kesehatan menyusut drastis, pemerintah baru memberi perhatian pada sektor kesehatan, namun tetap bukan sebagai fokus utama. Pada 1 April, pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi ke-3 senilai Rp 405 triliun, namun hanya Rp 75 triliun diantaranya yang ditujukan untuk intervensi kesehatan. Fokus stimulus ke-3 ini adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan program senilai Rp 220,1 triliun.

Stimulus besar ditengah pelemahan ekonomi ini telah melonjatkan defisit anggaran pemerintah secara drastis dari Rp 307 triliun (1,76 persen dari PDB) menjadi Rp 853 triliun (5,07 persen dari PDB). Melampaui batas atas defisit, 3 persen dari PDB, stimulus ini dibiayai secara masif dari utang hingga menembus Rp 1.000 triliun. Lebih jauh lagi, pelangaran cita-cita reformasi pasca krisis 1998 ini digantikan Perppu No. 1/2020 hingga 3 tahun anggaran ke depan.

Respon kebijakan menghadapi covid-19 harus secepatnya beralih dari berbasis "stabilitas dan pemulihan ekonomi" men-

jadi berbasis "penanggulangan bencana". Dengan berfokus pada menanggulangi bencana secepatnya, kita akan menciptakan landasan yang kokoh untuk pemulihan ekonomi di masa depan. Semakin tidak tegas tindakan yang diambil dalam menghadapi pandemi, semakin suram prospek ekonomi ke depan. Seluruh kebijakan pemerintah saat ini semestinya hanya memiliki tujuan tunggal: menanggulangi pandemi.

Dengan secepatnya berfokus pada penanggulangan bencana, kita akan menyelamatkan banyak nyawa, memulihkan prospek ekonomi jangka panjang, yang akan membuat biaya krisis menjadi jauh lebih kecil. Tindakan tegas menghadapi pandemi seperti pembatasan sosial berskala besar dan karantina wilayah, membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Dengan mencegah eskalasi pandemi, sistem kesehatan memiliki waktu untuk memulihkan populasi yang terinfeksi. Mencegah eskalasi pandemi secara efektif akan mencegah krisis sosial dan ekonomi, biaya pemulihan ekonomi akan menurun drastis.

Dengan menanggulangi pandemi secara cepat, kebutuhan terhadap jaring pengaman sosial akan menurun, dunia usaha dapat pulih dengan segera, dan stabilitas sistem keuangan akan terjaga. Pada gilirannya, hal ini akan memulihkan prospek pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Dengan tindakan tegas dan cepat menghadapi pandemi, kita akan banyak menghilangkan kebutuhan terhadap stimulus ekonomi. Simulasi kami menunjukkan secara tegas adalah mahal, namun bisa menjadi jauh lebih rendah dibandingkan biaya kerusakan ekonomi akibat pandemi.

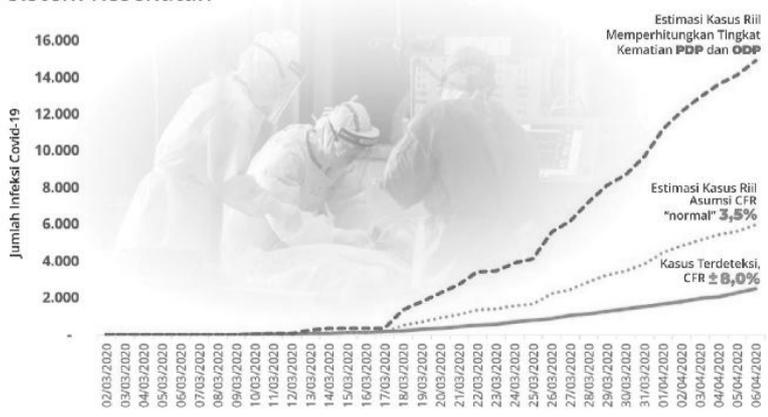
Dalam skenario "penanggulangan bencana", defisit anggaran pemerintah dapat ditekan di kisaran 3 persen dari PDB. Jika pemulihan berjalan lebih cepat, bukan tidak mungkin pemerintah tidak perlu melanggar batas defisit 3 persen dari PDB. Hal ini akan menurunkan kebutuhan berutang secara drastis, yang pada gilirannya akan meniadakan kebutuhan terhadap quantitative easing dengan meminta bank sentral secara langsung membeli surat utang pemerintah di pasar primer.

Semakin cepat tindakan tegas dilakukan, semakin rendah biaya menanggulangi pandemi. Sebagai misal, dalam jangka pendek, 1-2 pekan ke depan, kami merekomendasikan karantina wilayah untuk daerah yang menjadi episentrum wabah. Biaya karantina wilayah adalah mahal namun masih terjangkau dan lebih rendah dari biaya jika pandemi menjadi tak terkontrol. Alternatif karantina wilayah (*lockdown*) juga membutuhkan biaya yang mahal, yaitu *massive testing*, diikuti karantina ketat terhadap kasus terdeteksi dan *tracing* yang cepat terhadap *suspect*, seperti pola Karantina Selatan. Dengan jumlah penduduk sangat besar dan wilayah yang sangat luas, alternatif karantina menjadi jauh lebih mahal dan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Semakin banyak waktu berlalu, dan wabah semakin menyebar, semakin mahal biaya karantina. Untuk karantina wilayah Jabodetabek, kami melakukan estimasi, untuk biaya kebutuhan pangan warga per hari dibutuhkan setidaknya Rp 1,3 triliun. Jika karantina dilakukan 2 pekan, maka dibutuhkan Rp 17,8 triliun untuk kebutuhan pangan 34 juta penduduk Jabodetabek. Jika subsidi pangan berfokus pada penduduk miskin dan hampir miskin saja, maka biaya kebutuhan pangan untuk karantina 2 pekan adalah Rp 6,3 triliun. Semakin lambat karantina dilakukan, semakin panjang waktu yang dibutuhkan dan semakin besar biaya karantina. ■

DARURAT COVID-19

Antara Ketidaksiapan Pemerintah dan Batas Kapasitas Sistem Kesehatan



Sumber: Simulasi Staf IDEAS, kanalid hingga 6 April 2020



DITERAPKAN Papan reklame digital berisi imbauan #dirumahaja terpasang di kawasan Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (8/4). Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai Jumat, 10 April 2020.

Bansos Mulai Dibagikan

Polisi belum membatasi akses keluar-masuk Jakarta.

AMRI AMRULLAH

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Penerapan PSBB ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, secara efektif diterapkan pada Jumat, 10 April 2020.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah, antara lain, menyiapkan bantuan sosial pangan untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak atas PSBB dan kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19 di Jakarta. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta sesuai rapat koordinasi dan pengkajian PSBB bersama Forkopimda, Selasa (7/4) malam.

Terkait dengan tanggung jawab, lanjut Anies, Pemprov DKI Jakarta nanti bersama dengan pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan

rentan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19. "Jadi, insya Allah mulai Kamis (9/4) yang akan datang, akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Kita berharap kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentan miskin nanti kita akan bisa bantu," kata Anies, Rabu (8/4).

Anies menambahkan, pendistribusian bantuan sosial pangan ini akan dilakukan secara bersama-sama, yakni jajaran Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Bantuan sosial pangan akan diberikan secara gratis ke seluruh rumah masyarakat yang ditargetkan mendapatkan bantuan di mana pendistribusian langsung pada tingkat rukun warga (RW) di Jakarta.

Di samping itu, Anies juga meminta masyarakat untuk menaati ketentuan-ketentuan PSBB yang diterapkan di seluruh wilayah Jakarta. Semua warga perlu menjaga sama-sama keselamatan seluruh warga di mana akan sangat terganggu pada kedisiplinan pelaksanaan pengurangan interaksi ini. Jadi, ini penting sekali bagi semua untuk menaati.

"Kita semua menyadari, persoalan penyebaran Covid-19 membutuhkan kerja sama semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini. Karena, penyebarannya dari orang ke orang. Itu sebabnya interaksi antarorang penting sekali untuk dibatasi," ujar dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Wibi Andriano, mendukung kebijakan PSBB yang akan diterapkan secara resmi di Jakarta pada 10 April mendatang dan meminta warga mengikuti aturan tersebut. Wibi mengatakan, kebijakan PSBB perlu didukung semua pihak karena merupakan upaya perlawanan terhadap penyebaran virus korona.

Tidak hanya itu, lanjut Wibi, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB ini. "Kami meminta masyarakat mendukung kebijakan PSBB ini dan berlaku bijak atas bantuan yang telah diberikan," kata Wibi, Rabu (8/4).

Dia juga meminta agar Pemprov DKI tegas menerapkan aturan PSBB ini dengan memberikan sanksi kepada warga yang melanggar. "Semua kebijakan pemerintah saat ini harus dipatuhi dengan tertib. Jangan sampai upaya bersama ini gagal gara-gara satu dua pihak yang melanggar," ujar dia.

Aktivitas turan

Sementara, polisi mengklaim terjadi penurunan aktivitas warga yang berkerumun saat wabah virus korona (Covid-19) di wilayah Jakarta. Polisi menyebut, indikator pe-

nurunan itu adalah berbagai restoran atau rumah makan yang tidak lagi melayani makanan di tempat (*dine in*).

"Sekarang sudah mulai menurun (warga yang berkerumun). Indikator menurun apa? Restoran sudah *enggak* menerima lagi namanya orang bertamu datang ke situ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu.

Menurut Yusri, penurunan aktivitas warga yang berkerumun juga dipengaruhi dengan adanya patroli dari pihak kepolisian. Patroli itu, kata Yusri, dilakukan bersama dengan anggota TNI dan jajaran Pemprov DKI sejak pagi, siang, sore, dan malam hari.

Dia menuturkan, kegiatan patroli itu akan terus dilaksanakan sekaligus menyosialisasikan penerapan status PSBB di Jakarta. "Selama dua hari ini, kita sambilan patroli skala besar. Kita sambilan sosialisasikan kepada masyarakat masalah PSBB ini," ujar Yusri.

Dirlantas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo memastikan tidak ada penyetakan ataupun pembatasan terkait akses masuk-keluar Jakarta dalam masa status PSBB. "Tidak ada penyetakan akses, hanya pembatasan jumlah penumpang," kata Sambodo.

Selain itu, Sambodo juga memastikan tidak ada pemeriksaan bagi kendaraan maupun penumpang yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. "Belum ada pemeriksaan," ujar dia.

■ flori.sidebang ed: bilal ramadhan

KILAS

Penganiaya Transgender Diringkus

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Utara meringkus tiga tersangka penganiayaan terhadap seorang transgender bernama Mira yang menyebabkan korban meninggal dunia di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Tiga tersangka itu masing-masing berinisial AP, RT, dan AH, sedangkan tiga tersangka lainnya, yakni AB, IQ, dan PD masih dalam pengejaran polisi.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto, mengatakan, ketiga tersangka itu ditangkap pada Sabtu (4/4) di lokasi yang berbeda. Budhi menjelaskan, aksi penganiayaan itu berawal dari seorang sopir berinisial KM yang kehilangan sebuah tas di area garasi kontainer Tanah Merdeka, Jakarta Utara, Jumat (3/4).

Dalam tas itu, kata Budhi, terdapat dompet, satu unit tablet merek Samsung, dan sejumlah dokumen. "Yang dicurigai (mengambil tas) KM adalah korban (Mira) karena sebelum barang-barang tersebut hilang, korban datang menemui KM untuk meminta rokok sambil *ngobrol*," kata Budhi, Rabu (8/4).

Kemudian, Budhi menambahkan, KM melaporkan kehilangan tasnya itu kepada AG yang merupakan petugas keamanan garasi di lokasi kejadian. Tersangka AG pun lalu menjemput Mira dan membawa ke Terminal Tanah Merdeka untuk menanyakan perihal dugaan korban mengambil tas milik KM.

Korban pun mengaku tidak mengambil tas tersebut. Karena kesal, para tersangka mengeroyok korban. Tersangka AB memukul kepala korban dengan menggunakan papan kayu hingga korban terjatuh ke lantai.

Para tersangka juga menginjak korban. Setelah itu, tersangka AG membeli satu liter bensin eceran dan menyiramkannya ke badan korban. "Tersangka PD memainkan korek api dengan tujuan menakut-nakuti korban. Tetapi, malah menyulut api hingga menyebabkan korban terbakar," ujar Budhi.

Korban yang mengalami luka bakar sempat berlari sejauh 200 meter ke arah kontrakan. Kemudian, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia.

Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP Ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

■ flori.sidebang ed: bilal ramadhan

Ribuan Tukang Cukur Tutup Usaha

JAKARTA — Sebanyak 85 persen dari total 4.000 pengusaha cukur rambut dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) telah menutup usaha mereka. Penutupan usaha ini karena terimbas Covid-19 di Jakarta.

"Delapan puluh lima persen sudah tutup di Jakarta, termasuk *barbershop* saya di Pancoran," kata Penasihat PPRG Rudi di Jakarta, Rabu (8/4).

Penutupan tempat usaha itu berlangsung secara bertahap sejak 20 Maret 2020 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Rudi mengatakan, alasan penutupan berkaitan dengan wabah Covid-19 yang rawan ditularkan konsumen ataupun sebaliknya.

"Sudah 20 hari ini kami tutup," kata dia menambahkan.

Rudi menambahkan, saat ini pengusaha pangkas rambut beserta pegawainya sebagian besar telah pulang kampung. Terlebih, dengan pembatasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Jumat (10/4), kata Rudi, konsumen akan semakin sepi.

"Jadi, daripada di sini tidak ada pelanggan, tidak dapat uang, lebih baik mudik ke kampung," ujar dia.

■ antara ed: bilal ramadhan

Temuan APD yang Dibuang di Jagakarsa Diselidiki

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki temuan alat pelindung diri (APD) berupa pakaian dekontaminasi atau pakaian dan sarung tangan yang dibuang oleh kendaraan di Jalan Moch Khafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

"Untuk APD, anggota masih meminta keterangan saksi-saksi yang melihat dan masih diselidiki untuk keterangan ambulans dari mana," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Budi Sartono, Rabu (8/4).

Menurut Budi, dari keterangan awal saksi yang melihat ada dua mobil berhenti di lokasi

kejadian temuan APD yang dibuang ke selokan pinggir jalan tersebut. "Orang di dalam mobil tidak turun membuang baju APD itu, keterangan dari ketua RW setempat dibuang ke selokan," ujar Budi.

Hingga saat ini, lanjut Budi, pihaknya masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi terkait temuan APD yang diduga bekas pakai dibuang oleh orang tidak dikenal. Keterangan saksi apakah ada yang melihat nomor kendaraan dan segala macam masih ditelusuri.

Video temuan APD berupa hazmat berwarna putih lengkap dengan dua pasang sarung tangan berwarna biru di Jalan

Moch Khafi, Jagakarsa, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 25 detik, pembuang video menyebutkan pembuang APD tersebut dari dua ambulans UGD yang tidak diketahui dari mana asalnya.

Lokasi temuan APD disebutkan di dekat rumah Ketua RW 06, Kampung Kandang, Jagakarsa, pada Selasa (7/4) malam. Sementara itu, Puskesmas Jagakarsa memastikan APD yang ditemukan di Jalan Moch Khafi bukan berasal dari fasilitas kesehatan tersebut.

Kepala Puskesmas Jagakarsa, Susilowati, mengatakan, ambulans yang membuang APD tersebut bukan milik puskes-

masnya. Kasus temuan APD yang dibuang di selokan tersebut, lanjut dia, bisa ditelusuri menggunakan CCTV yang terdapat di wilayah tersebut.

"Insya Allah, bukan ambulans kita. Ambulans kita kan bukal rujukan pasien," kata Susilowati.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji menyayangkan pembuangan alat pelindung diri (APD).

Menurut Isnawa, dalam situasi saat ini petugas medis hendaknya bisa memberikan contoh kepada masyarakat dalam penanganan virus korona Covid-19

yang benar sesuai dengan prosedur tetap yang ada.

"Jadi, mereka (tenaga medis) masih membuang sampahnya dengan salah, apalagi membuang limbah medis itu sangat berbahaya," ujar Isnawa yang juga Wakil Wali Kota Jakarta Selatan ini.

Isnawa juga meminta aparat berwajib segera menyelidiki kejadian tersebut untuk menciptakan rasa aman di masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Isnawa juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memonitor wilayahnya serta melaporkan kejadian yang terjadi di lingkungannya,

seperti temuan APD yang dibuang tersebut, termasuk melaporkan orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam penanganan (PDP).

Menurut Isnawa, saat ini peran aktif masyarakat dituntut untuk mengawasi lingkungannya masing-masing, memastikan tidak ada yang bergerombol, tidak berkerumun, dan tidak ada aktivitas-aktivitas yang mengundang orang untuk berkumpul dengan menerapkan jaga jarak sosial dan fisik (*social and physical distancing*).

"Saya berterima kasih kalau masyarakat ada yang mengawasi lingkungannya," kata Isnawa.

■ antara ed: bilal ramadhan

'Masker Sulit Dicari, Harganya Juga Gila-gilaan'

OLEH FLORI SIDEBANG

Ada berbagai jenis transportasi umum yang dapat digunakan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari bus Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), Moda Raya Terpadu (MRT), hingga LRT. Transportasi umum pun menjadi salah satu andalan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk mencapai tempat yang ingin dituju.

Namun, sejak virus korona mulai mewabah di Indonesia, kebijakan-kebijakan baru yang bersifat darurat diterapkan bagi seluruh transportasi umum yang ada, seperti menjaga jarak saat berada di dalam transportasi umum, penyediaan *hand sanitizer* di setiap halte bus dan stasiun KRL. Bahkan, aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mewajibkan pengguna transportasi umum untuk mengenakan masker.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan melalui

surat kepada para pimpinan moda transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT untuk menerapkan kewajiban penggunaan masker kepada seluruh penumpangnya. Dalam surat tersebut, Anies juga menegaskan, bagi penumpang yang tidak menggunakan masker, tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum tersebut.

Saat *Republika* mencoba mendatangi beberapa halte bus Transjakarta, terlihat para penumpang bus telah menggunakan masker. Bahkan, para petugas halte pun menggunakan masker.

Salah seorang pengguna Transjakarta, Nadine Vita, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah tepat. Sebab, menurut dia, melalui kebijakan itu mampu menyadarkan masyarakat bahwa menggunakan masker saat berada di luar rumah adalah hal yang penting, terutama saat wabah virus korona yang terjadi seperti saat ini. Meski demikian, Nadine mengaku

telah memiliki kesadaran untuk menggunakan masker saat berada di transportasi umum jauh sebelum virus korona menyebar. Sebab, kata dia, hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan saat berada di keramaian.

"Tapi, jadi tidak bagus kalau (kebijakan itu) tidak dibarengi dengan sosialisasi atau bantuan ke masyarakat," kata Nadine.

Dia menilai, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan masker, tetapi juga patut memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat memperoleh masker yang layak dengan harga terjangkau.

"Sekarang kan masker (bedah) makin susah didapat, sedangkan harga masker kain harganya gila-gilaan, mahal sekali," ungkap dia.

Penumpang lainnya, Aurelia Octavia, mengatakan, perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan masker sebagai bentuk perlindungan diri, terutama karena angka masyarakat yang positif terjangkit virus korona setiap harinya



terus meningkat.

Aurel menuturkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah juga perlu tegas dalam mengawasi penjualan masker sehingga harga masker di pasaran tidak membebani masyarakat.

"Kan kasian juga kalau ada penumpang yang tidak pakai masker karena *enggak* mampu beli, malah *enggak* bisa naik transportasi umum," tutur Aurelia.

Di sisi lain, seorang petugas halte

bus Transjakarta, Iswandi, mengatakan, hingga saat ini dia bersama petugas halte lainnya terus menyampaikan sosialisasi kepada para penumpang mengenai kebijakan tersebut.

Jika ada penumpang yang tidak menggunakan masker, masih diberikan toleransi. Namun, saat kebijakan itu mulai efektif dilakukan, penumpang yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan naik bus.

■ ed: bilal ramadhan

Pasar Otomotif Kian tak Menentu



● **Pabrik Mercedes Benz di Wanaherang, Kab Bogor.**

Meski berhenti berproduksi, perusahaan menjamin pelayanan *after sales* tetap berjalan.

■ ERICK ISKANDARSJAH Z

Awalnya, prediksi pasar otomotif nasional tahun ini akan lebih baik dibandingkan 2019. Tapi ternyata, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Virus Covid-19 telah membayarkan harapan itu, sehingga pabrik pun harus menghentikan ulang produksi, dan bahkan beberapa di antaranya menghentikan produksi untuk sementara, serta merumahkan karyawannya.

Sejumlah pabrik yang sudah resmi menghentikan produksinya mulai bulan ini, di antaranya Honda, Mercedes-Benz, dan Suzuki. Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy mengatakan, lewat kebijakan itu, maka karyawan yang berhubungan langsung dengan proses produksi untuk sementara tidak perlu datang ke kantor.

"Kebijakan ini mulai berlaku pada 13 April 2020 dalam kurun waktu selama 14 hari," kata Yusak, Selasa (7/4).

Ia menekankan, selama periode itu hanya lini produksi yang berhenti beroperasi, sedangkan kegiatan operasional lain di pabrik dan *head office* masih tetap berjalan. Di satu sisi, HPM juga terus memonitor permintaan pasar untuk mempersiapkan strategi yang tepat dalam menjalankan aktivitas produksi di bulan-bulan mendatang.

Produksi HPM saat ini dilakukan dipabriknya di Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas mencapai 200 ribu unit per tahun. Model yang diproduksi di pabrik ini meliputi Honda Brio, Mobilio, BR-V, HR-V, CR-V, dan Honda Jazz.

Menurut Yusak, penghentian produksi tersebut akan berdampak terhadap sekitar tujuh ribu unit mobil yang dibuat untuk pasar domestik, namun tidak berdampak terhadap produksi untuk pasar ekspor. Penyesuaian di lini produksi juga tidak berimbas pada pengurangan karyawan di pabrik HPM dan semua karyawan tetap mendapatkan gaji pokok penuh serta tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini dilakukan, lanjut dia, untuk menjaga keseimbangan antara persediaan dan permintaan, mengingat penyebaran virus korona telah membuat penjualan Honda mengalami penurunan.

Berdasar hasil rekapitulasi HPM pada Maret 2020, tercatat sebanyak 10.657 unit mobil Honda terjual di Indonesia atau turun 11 persen dari bulan sebelumnya. "Dalam

kondisi pasar yang sedang turun saat ini, sangat penting untuk tetap menjaga level stok dan pasokan agar tetap seimbang dengan permintaan pasar. Karena itu, kami akan melakukan penyesuaian dengan menghentikan sementara aktivitas produksi di pabrik," ujarnya.

Terkait target penjualan pada 2020, ia masih mengacu pada angka awal. Karena, Yusak menilai, saat ini masih terlalu dini untuk melakukan prediksi pasar hingga akhir tahun. HPM menilai kondisi pasar masih belum stabil dan dapat berubah dengan cepat dari waktu ke waktu.

"Kita harus fleksibel menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi terkini. Tentu kami akan menyesuaikan target untuk mempertahankan tingkat stok yang sehat," ucap dia.

Penghentian sementara lini produksi juga dilakukan Mercedes-Benz pada fasilitas produksinya di Wanaherang, Bogor. Penutupan ini telah dilakukan sejak 26 Maret 2020 lalu.

Public Relations Department Head PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Dennis Kadarusan, mengatakan, keputusan menutup sementara fasilitas pabrik dilakukan untuk mematuhi rekomendasi dari pemerintah. "Kami mematuhi arahan dan instruksi dari otoritas. Penghentian aktivitas pabrik sementara ini akan diperpanjang jika dibutuhkan. Keputusan akan ditetapkan berdasarkan perkembangan selanjutnya," kata Dennis.

Ia menekankan, karyawan Mercedes-

Benz saat ini bekerja dari rumah (*work from home*) untuk mematuhi pedoman *social distancing*. Meski demikian, karyawan juga akan tetap menerima kompensasi atau gaji secara normal.

Saat ini, fasilitas produksi Mercedes-Benz untuk perakitan kendaraan penumpang dan kendaraan komersial melibatkan sekitar 500 orang. Namun Dennis memastikannya bahwa penyebaran Covid-19 tidak memaksa Mercedes-Benz untuk melakukan pengurangan karyawan.

Suzuki pun melakukan hal yang sama. Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales, Seiji Itayama, mengatakan, perusahaan melakukan sejumlah upaya demi dapat melindungi kesehatan karyawan.

"Saat ini yang menjadi prioritas utama kami adalah kesehatan seluruh elemen perusahaan. Untuk alasan itu, Suzuki akan menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik sebagai salah satu upaya melindungi karyawan," kata Itayama.

Penghentian kegiatan produksi tersebut akan berlangsung selama dua pekan mulai dari 13 April sampai 24 April 2020 di ketiga lokasi pabrik Suzuki, yaitu di Cakung, Tambora, dan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Meski begitu, Suzuki tetap akan memberikan upah secara penuh kepada karyawan yang sementara tidak bekerja.

Selain memprioritaskan kesehatan karyawan, di sisi lain Suzuki juga tetap fokus pada kualitas layanan pelanggan. "Karena di saat seperti ini, justru kami harus memberikan hal positif kepada masyarakat agar tetap tenang, termasuk dalam merawat kendaraan. Saya pastikan layanan *after sales* Suzuki tetap berjalan di masa yang berat ini," kata Itayama. ■ **edk**hoiril.azwar



● **Suasana pameran otomotif GIIAS 2019.**

Target Pasti Meleset

■ ERICK ISKANDARSJAH Z

Saat ini, kondisi penuh dengan ketidakpastian. Target penjualan nasional yang kembali mampu menembus satu juta unit pun terancam tak tercapai. Mengingat, penurunan penjualan sudah mulai terasa pada Maret 2020.

Pengamat Otomotif Bebin Juana menilai, adalah hal yang sangat menantang bagi pabrik yang memiliki ambisi untuk melakukan pembukuan penjualan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. "Artinya, target penjualan nasional di atas satu juta unit kemungkinan besar akan sangat sulit dapat dicapai," katanya, Selasa (7/4).

Oleh karena itu, ia menilai Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan pabrik perlu melakukan kajian kondisi pasar. Lewat kajian itu, diharapkan Gaikindo dan pabrik dapat melakukan revisi target penjualan yang lebih realistis setelah melihat dampak dari pandemi.

Menurutnya, Gaikindo dan pabrik terus melakukan kajian demi dapat menghadirkan strategi yang paling akurat. Biasanya revisi target itu akan diumumkan pada awal semester kedua.

"Jika melihat realitas saat ini, rasanya target penjualan memang perlu direvisi. Tapi tentu revisi ini baru dapat ditetapkan setelah melihat data penjualan pada bulan April dan Mei."

Soal penghentian sementara lini produksi sejumlah pabrik, Bebin menilai hal itu merupakan aksi yang tepat. Karena, hal ini sekaligus menyiratkan bahwa pabrik juga sangat memperhatikan keselamatan karyawan. Meskipun, tentu kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan terkait jumlah persediaan kendaraan.

Menurutnya, penghentian sementara ini dilakukan karena jumlah stok yang ada saat ini sudah cukup memenuhi permintaan dalam beberapa pekan ke depan. Sehingga, penghentian sementara pun dinilai jadi strategi yang paling efisien.

"Jika hanya mengurangi *shift* pabrik, maka proses produksi akan berjalan dengan tidak efisien dan biaya produksi akan meningkat. Padahal, dalam kondisi seperti ini rasanya sangat tidak baik jika pabrik harus meningkatkan harga jual kendaraan," ujarnya.

Kembali pada soal angka penjualan, kondisi pasar saat ini pun membuat Gaikindo terpaksa mengiyakan bahwa angka total diperkirakan tak akan mencapai satu juta unit. Ketua I Gaikindo, Jongkie D Sugiarto memprediksi, jika dampak korona terjadi selama beberapa bulan, maka angka penjualan akan terpengang sekitar 40 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Jika pandemi masih terjadi hingga beberapa bulan, maka diprediksi total penjualan nasional sepanjang 2020 hanya sekitar 600 ribu unit," kata Jongkie.

Prediksi itu dihitung berdasar penurunan penjualan yang mulai terjadi pada Maret 2020. Menurut dia, pada Januari dan Februari, catatan penjualan berada pada level sekitar 80 ribu unit per bulan. Sedangkan pada Maret, berdasar data sementara, penjualannya hanya sekitar 60 ribu unit.

Ia memperkirakan, penurunan signifikan juga akan terjadi bulan ini mengingat penjualan sepanjang April hingga Juli akan sangat bergantung pada status pandemi Korona di Indonesia.

"Kami berharap, wabah ini dapat segera berakhir. Jika wabah berakhir, maka penurunan penjualan tak perlu terjadi hingga tiga bulan," ujarnya. ■ **edk**hoiril.azwar

Klub Mobil Pun Ikut Turun

■ KHOIRUL AZWAR

Dunia Otomotif Indonesia turut prihatin dengan semakin mewabahnya virus korona jenis baru, yaitu Covid-19. Sebagai ungkapan rasa duka, mereka turut memerangi penyebaran virus dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan memberikan donasi di sejumlah daerah.

Sebanyak 14 klub Suzuki yang tergabung dalam Suzuki Club Reaksi Cepat (SCRC) turun ke lapangan guna membantu masyarakat dalam membasmi virus yang mematikan itu. Berkolaborasi dengan Indonesia Off-road Federation (IOF), BPPD Bekasi, Pramuka Peduli Bekasi, dan beberapa pihak lainnya, SCRC menurunkan tim untuk memberikan bantuan dan penyemprotan disinfektan sejak 22 Maret 2020 di beberapa titik di wilayah zona merah Jabodetabek.

"SCRC memang menjalankan fungsi sebagai tim reaksi cepat. Apa yang dilakukan ini murni keinginan kami untuk membantu masyarakat. SCRC juga berterima kasih kepada PT Suzuki Indomobil Sales yang selalu



mendukung semua kegiatan," ujar Ketua Umum SCRC, Rachmat Pangestu, pekan ini.

SCRC di bawah naungan Suzuki itu memberikan donasi berupa sumbangan baju Alat Pelindung Diri (APD), toren, dan cairan disinfektan ke Puskesmas Kota Baru, Bekasi. Dalam

kegiatan itu, klub ini juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke beberapa sekolah, perumahan, dan tempat ibadah, seperti di Masjid Nurul Huda Bantargebang, dan Masjid Abdul Kodir Jaelani Vila Mutiara Gading 2. Rachmat menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bentuk

kepedulian SCRC dan Suzuki kepada masyarakat. "Kami harap dengan adanya tim SCRC yang terjun langsung ke lokasi kali ini dapat membantu masyarakat agar semakin sadar bahaya Covid-19 dan mencegah penyebarannya," ujarnya. General Manager Strategic

Planning PT Suzuki Indomobil Sales, Ei Mochizuki mengungkapkan apresiasinya. "Kami mengucapkan terima kasih kepada SCRC yang telah membantu masyarakat mencegah penyebaran Covid-19. Suzuki akan terus mendukung kegiatan yang bermanfaat dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat".

Dalam kesempatan lain, Head of Service PT SIS, Riecky Patrayudha mengatakan, sejak diluncurkan tahun 2017 lalu, Suzuki Ignis masih terus menjadi incaran pelanggan. Hal itu tidak lain dari sejumlah kelebihan yang dimiliki *citycar* ini, salah satunya adalah biaya perawatan yang relatif lebih ringan.

Disebutkan, biaya perawatan Ignis menjadi yang paling terjangkau di kelasnya. Untuk perawatan berkala selama 0-50.000 Km hanya sebesar Rp2.289.700 dan selama 60 ribu -100 ribu Km hanya sebesar Rp4.832.600.

"Lewat biaya perawatan yang cukup terjangkau ini, SIS berharap konsumen Ignis tetap rutin melaksanakan servis mobilnya di bengkel resmi Suzuki," katanya. ■



1

Supermoon Terbesar

dari Berbagai Belahan Dunia



2



3



4

■ PUTI ALMAS

Fenomena alam berupa bulan purnama atau jamak disebut *supermoon*, terlihat pada Selasa (7/4) malam. Istilah *supermoon* dibuat pada 1979 oleh ahli astrologi Richard Nolle. Ini kemudian menjadi istilah yang makin populer dalam beberapa dekade sejak itu. *Supermoon* terjadi ketika bulan sangat dekat dengan bumi dan membentuk penuh objek seperti purnama. Kedekatan bulan dengan bumi, secara alami, membuatnya terlihat sangat dekat dan terang, bahkan diperkirakan hingga 14 persen lebih besar dan 30 persen lebih terang dari bulan purnama pada titik terjauh dari planet manusia. *Supermoon* kali ini juga dijuluki sebagai bulan merah muda. Adakah warna merah muda di sana? Tentu tidak. *Supermoon* yang muncul pada April sering dihubungkan dengan bunga mekar di awal musim semi *phlox subulata*, bunga liar merah muda asli yang ada Amerika Utara bagian timur. Bunga liar umumnya disebut merayap *phlox* atau lumut *phlox* dan dikenal juga dengan nama *moss pink* (lumut merah muda).

Dari tiga *supermoon* yang muncul pada 2020, *supermoon* malam tadi merupakan *supermoon* terbesar dan tercerah. Hal ini karena posisi Bulan berada terdekat dengan Bumi. *Supermoon* berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada 7 Mei atau satu bulan setelahnya. ■ ed: edwin dwi putranto

KETERANGAN FOTO

1. *Supermoon* terlihat di Papago Park, Arizona, Amerika Serikat, Selasa (7/4).
2. *Supermoon* dipotret di Papago Park, Arizona, Amerika Serikat, Selasa (7/4).
3. *Supermoon* terlihat saat pagi hari dengan latar depan instalasi neon di Dresden Zwinger, Jerman, Selasa (7/4).
4. Bulan *supermoon* yang juga disebut sebagai *super pink moon* menghiasi langit Kota Lhokseumawe, Aceh, Rabu (8/4) dini hari.
5. *Supermoon* muncul di belakang karya seni Seven Magic Mountains karya seniman Ugo Rondinone di Las Vegas, Selasa (7/4).
6. Bulan *supermoon* terlihat di belakang Gedung Empire State di New York, Selasa (7/4).
7. *Supermoon* terlihat di atas kastil Mow Cop, Staffordshire, Inggris, Selasa (7/4).
8. Pemandangan *supermoon pink* terlihat dari Guadalajara, Jalisco, Meksiko, Selasa (7/4).



5



EDUARDO MUNOZ/REUTERS

6



CARL REICING/REUTERS

7



FRANCISCO GUASCO/EPA-EFE

8